

Bambang Haryo Suseno
Tata Pemerintahan Masa Lampau di Pulau Bangka
Berbasis Telaah Manuskrip Tjarita Bangka

TATA PEMERINTAHAN MASA LAMPAU DI PULAU BANGKA

Berbasis Telaah Manuskrip *Tjarita Bangka*

Oleh: Bambang Haryo Suseno

ABSTRAKSI

Sejarah Pulau Bangka tak lepas dari sejarah besar kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satunya tergambar dari tata pemerintahan dan birokrasi atas Bangka yang dipengaruhi oleh kekuasaan baik kerajaan maupun penguasa pada masanya. Pangkat seperti Depati, Batin, dan gelar seperti Abang dan Yang, adalah jejak pengaruh kerajaan Nusantara yang terdapat di pulau ini.

Tak banyak sumber literasi yang mengungkap tentang data itu. Merujuk kepada beberapa naskah, catatan sejarah atas Pulau Bangka dari penulis lokal baru dideteksi ada pada paruh abad ke-19 M. *Tjarita Bangka*, ditulis oleh Haji Idris di Mentok. Setelah itu tercatat beberapa tulisan baik lokal maupun penulis asing yang mengumpulkan data tentang Bangka.

Berangkat dari situ, tulisan ini dibuat untuk mencoba menelusuri data bersumber dari manuskrip dan sumber literasi lain untuk memberikan gambaran tata pemerintahan di Bangka pada masa pengaruh kerajaan besar di Nusantara.

Dari manuskrip dan sumber literasi tersebut, didapati gambaran bahwa Pulau Bangka memiliki corak tata pemerintahan yang unik di masa lampau. Pemimpin di pulau ini secara umum adalah tokoh yang diangkat oleh penguasa yang berpengaruh atas Bangka, mulai dari era Madjapahit, Kesultanan Johor-Minangkabau, Banten, Palembang Darussalam, hingga pemerintah kolonial. Tata pemerintahan/ birokrasi, pangkat, dan gelar penguasa lokal memiliki pola dan keterkaitan yang khas atas pengaruh dan kepentingan kerajaan/ kesultanan atau penguasa besar yang menguasai Pulau Bangka.

Kata kunci: tata pemerintahan di Pulau Bangka di masa lampau, Manuskrip *Tjarita Bangka*, pengaruh kerajaan-kerajaan di Nusantara.

ABSTRACT

The history of Bangka Island cannot be separated from the great history of the kingdoms in Indonesia. One of them is reflected in the governance and bureaucracy of Bangka, which was influenced by the power of both the kingdom and the rulers of their time. Ranks such as Depati and Batin and titles such as Abang and Yang are traces of the influence of Indonesia's kingdoms on this island.

Not many literacy sources disclose this data. Referring to several manuscripts, historical records on Bangka Island from local authors were only detected in the second half of the 19th century in Tjarita Bangka, written by Haji Idris in Mentok. Following that, several writings, both local and foreign, were recorded that gathered information about Bangka.

Departing from there, this article was created to try to trace data sourced from manuscripts and other literacy sources to provide an overview of governance in Bangka during the period of influence of the great kingdoms in the Indonesia.

From the manuscripts and literacy sources, it is found that the island of Bangka had a unique style of governance in the past. Leaders on this island in general were figures appointed by rulers who had influence over Bangka, starting from the Madjapahit era, the Johor-Minangkabau Sultanate, Banten, and Palembang Darussalam, to the colonial government. The governance/bureaucracy, rank, and title of local rulers have a pattern and a specific connection to the influence and interests of the kingdom/sultanate or big rulers who control Bangka Island.

Keywords: *Governance on Bangka Island in the past, Tjarita Bangka Manuscript, the influence of kingdoms in Indonesia.*

A. Pendahuluan

A.1. Latar Belakang

Pulau Bangka memiliki rekam jejak sejarah panjang sebagai bagian dari gugus pulau di Nusantara yang terkenal, merupakan bagian dari kisah kejayaan kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa lampau, menjadi pulau penting pada masanya dengan komoditi timah dan lada yang mendunia. Beberapa kerajaan besar seperti Madjapahit, Johor-Minangkabau, Banten, Kesultanan Palembang, bahkan Bangsa Eropa seperti Inggris dan Belanda mencatatkan pengaruhnya atas pulau ini.

Sebagai bagian dari hegemoni kekuasaan yang berkuasa atas pulau ini, Pulau Bangka memiliki bentukan dan struktur pengaturan masyarakat termasuk tata pemerintahan yang terpengaruh kepada struktur penguasanya. Penulis merasa penting untuk mengetahui pola struktur pemerintahan di Pulau Bangka pada masing-masing periode sejarah penguasaannya, sebagai upaya dari mengenaliinggalan masa lalu, menemukan pola atas keterkaitan pengaruh, dan menggali keteladanan atau kearifan lokal atas peninggalan sejarah tersebut sebagai referensi dan pembelajaran bagi pembangunan Indonesia di masa depan. Belajar dari sejarah masa lampau, untuk menata dan mengejar masa depan yang gemilang.

Keterbukaan akses informasi yang semakin luas saat ini menjadikan pencarian atas sumber-sumber literasi sejarah Nusantara semakin mudah. Beberapa lembaga internasional seperti perpustakaan di negara-negara Eropa membuka akses atas manuskrip dan literasi lain. Hal ini membuka cakrawala pengetahuan tentang sejarah Bangka yang semakin bisa diungkap. Beberapa manuskrip seperti *Tjarita Bangka I*, manuskrip asal Mentok, Pulau Bangka, yang ditulis tahun 1878 (dikatalogkan dengan kode KITLV Or. 67) koleksi KITLV Leiden, lalu manuskrip *Soerat tjerita atsal tanah dan orang jang mendijami tanah Banka* yang ditulis tahun 1879 (dikatalogkan dengan kode UBL COD. Or. 2285) koleksi dari *Universiteitsbibliotheek Leiden*, dan *Riwajat Poelau Bangka Berhoeboeng dengan Palembang*, tulisan Raden Ahmad dan Abang Abdul Jalal, tahun 1925, koleksi KITLV dengan katalog KITLVH 1198.

Manuskrip-manuskrip ini menjadi sumber tak terkira bagi penelitian dan telaah atas kondisi Pulau Bangka di masa lampau. Manuskrip ini tidak saja penting bagi sumber referensi sejarah, tetapi sebagai tulisan dari orang Mentok, Bangka, pada masa lalu memiliki arti penting tersendiri bahwa tulisan ini mewakili mata dan hati orang lokal dalam menuliskan sejarah. Sebuah sudut pandang yang berharga bagi penulis untuk memahami dan merasakan peristiwa dari sudut pandang penulis lokal di Pulau Bangka.

A.2. Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, dan Metodologi

Penulis ingin menggali dan memberikan gambaran tentang bagaimana tata pemerintahan dari masa pulau ini berada dalam pengaruh kekuasaan kerajaan besar di Nusantara yang berkuasa di Pulau Bangka, dengan bersumber dari kajian atas manuskrip, catatan sejarah tentang Bangka, dan buku referensi tentang pengaruh kerajaan di Nusantara terhadap Bangka. Ruang lingkup penulisan dibatasi pada periode antara abad 14 Masehi hingga masa akhir Kesultanan Palembang (sebelum kekuasaan Inggris dan Belanda atas Bangka) pada awal abad 19 Masehi.

Metode yang digunakan adalah metode historis, di mana penulis mengumpulkan sumber-sumber (kepuustakaan), melakukan pengkajian, menguji dan menafsirkan data, melakukan analisa, dan menyajikan dalam sintesa untuk mengkonstruksi dan mendeskripsikan peristiwa masa lampau sebagai informasi.

B. Pembahasan

B.1. Tata Pemerintahan di Era Kerajaan Nusantara

Tata pemerintahan hari ini dimaknai sebagai penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaganya. Pengertian ini sebenarnya mengarah kepada pemahaman baru yang disebut *Governance*, masif berkembang di seluruh dunia pada abad ke-20. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata pemerintah juga dimaknai sebagai penguasa atas sebuah negara/ negeri (sebagai lawan partikelir atau swasta). Perkembangan tata pemerintahan di Nusantara sampai hari ini memiliki perjalanan panjang. Dimulai dari sistem pemerintahan di masa kerajaan Nusantara, era kolonialisme, hingga memasuki era pembentukan negara republik.

Sistem pemerintahan di masa kerajaan bermula dari lingkup yang sederhana dari terbentuknya perkampungan sebagai satu unit politik yang berdaulat yang juga membentuk kelompok untuk mengambil keputusan penting seperti masalah produksi ekonomi (pertanian), upacara ritual, dan sebagainya. Perkampungan ini berkembang menjadi kerajaan dengan raja di puncak pimpinannya. Pimpinan yang berkuasa menjamin atas perlindungan, keamanan, peradilan, upacara agama, gaji, dan aturan bagi perilaku masyarakat. Sebaliknya, masyarakat memberikan pajak, upeti, kerja paksa, tenaga, dan pelayanan bagi penguasa. Dalam perkembangan berikutnya, struktur kekuasaan membentuk legitimasi simbolik atas bangsawan.

Struktur di masa kerajaan cenderung bersifat sentralistis, absolut, dan otoritarian. Pembagian wilayah kerajaan bersifat konsentris (istana sebagai pusatnya) juga bersifat dikotomis; pusat dan pinggiran. Kecenderungan ini yang kemudian membentuk pola raja menerapkan hal seperti; menempatkan agen terpercayanya di semua daerah, mengangkat atau menempatkan anggota keluarga di posisi penting/ jabatan penting dipegang oleh elit secara personal dan paternalistik atas dasar keturunan dan kekerabatan. Gambaran di atas akan diurai dengan melihat pengaruh beberapa kerajaan besar di Nusantara dalam kaitan tata pemerintahan yang berlaku dan perkembangannya di Pulau Bangka.

B.2. Manuskrip Tentang Sejarah Pulau Bangka

Merujuk pada buku *Tjarita Bangka, Het Verhaal Van Bangka Tekstuitgave met introductie en addenda* (1990) tulisan E.P. Wieringa, manuskrip yang menjadi rujukan peneliti Belanda mengkaji sejarah Bangka adalah:

- a. Tulisan Abang Arifin, Temenggung Kertanegara pada 1861, tersimpan di perpustakaan KITLV (*Koninklijk Instituut voor Taal en Volkenkunde*) di Leiden-Belanda, diarsipkan pada tahun 1879 (dosir KITLV Or 68). Tulisan ini tidak berjudul, dikatalogkan oleh Van Ronkel (1908) dengan judul *Tjarita Bangka II*.
- b. Tulisan Haji Idris. Diarsipkan di KITLV, Leiden-Belanda pada 1878 (dosir Or. 67). Sama dengan tulisan Abang Arifin, manuskrip ini tidak berjudul, dikatalogkan dengan judul *Tjarita Bangka I*.

Gambar 1
Halaman awal tulisan Haji Idris

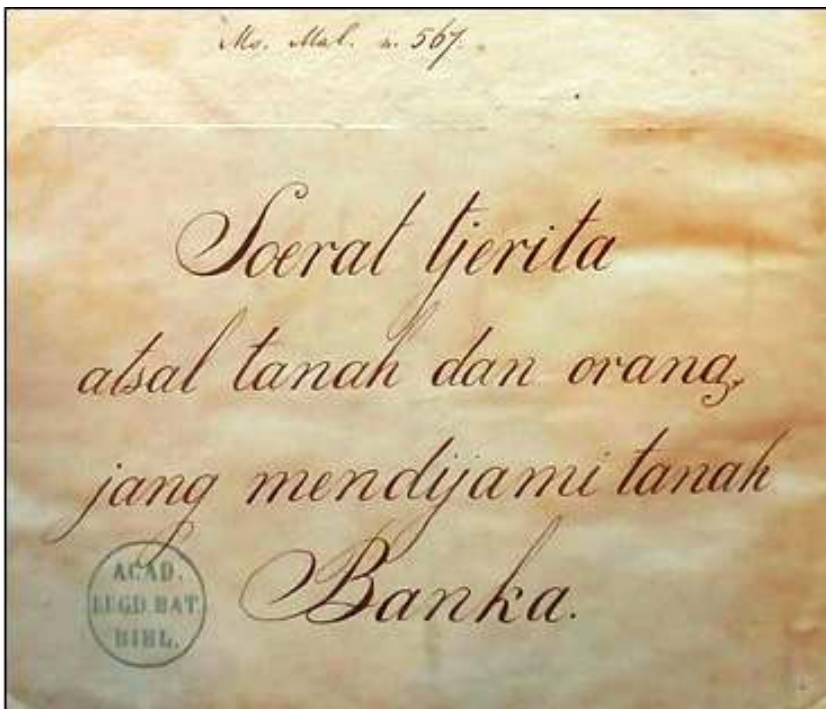
فصل یثفر تا م .

بومول سده دغرجهت داري اورغ توام دمنتواصل مجدين
ایت فولوبقکل دواقرکارکسین .

نمفرکارمکل دچریتنکن مجدين ایت فولوبقکل داري سات فراهو
بکیت بسرکلور داري نکري جوهور دغن بابق بقسا فومفوان لکيه .
اورغیغ اتق فراهون جراکنن نام نخودرکمه مک ایت فراهوسده
برلايردافت اغین کوسدان کلمیغ بسر ددلم انتارایت نخودرکمه
ماتی کسب کناجروم فبجاهیت داري دیا فون استوي تتانی داري
کباپکن اورغ لاین . بقسا ددلم ایت فراهو ادیغ فیکیرایت جراکن کنا
بونله دغن کسب ایت سده جدي براموک مک بابقلمه مریکیت ماتی
دان کوک مک ایت فراهو جدي اپوت ایکوت اغین سام اروس فون
سوک دغن کسب ایت سده جدي کندس اتوتغکلم مک ایت فراه
هوله یغ جدي فولوبقکل دان تیغن منجدي کونخ سات سمفن منجادي
فولوبلیتوغ دان سفوتوغ کامرن منجدي باتوبالی دان دافورن منجادي
فولونام سمبواغ دافوردمان تبوالیده مک ان اورغیغ لکيه هید فایت
یغ منجدي اصل اورغ بقکل .

- c. Tulisan Abang M. Ali, Temenggung Kertanegara II, tahun 1879, *Universiteit Bibliotheek Leiden* (UBL) memberikan nomor dosir 2285 dan memberi label dalam aksara latin *Soerat tjerita atsal tanah dan orang jang mendijami tanah Bangka*.

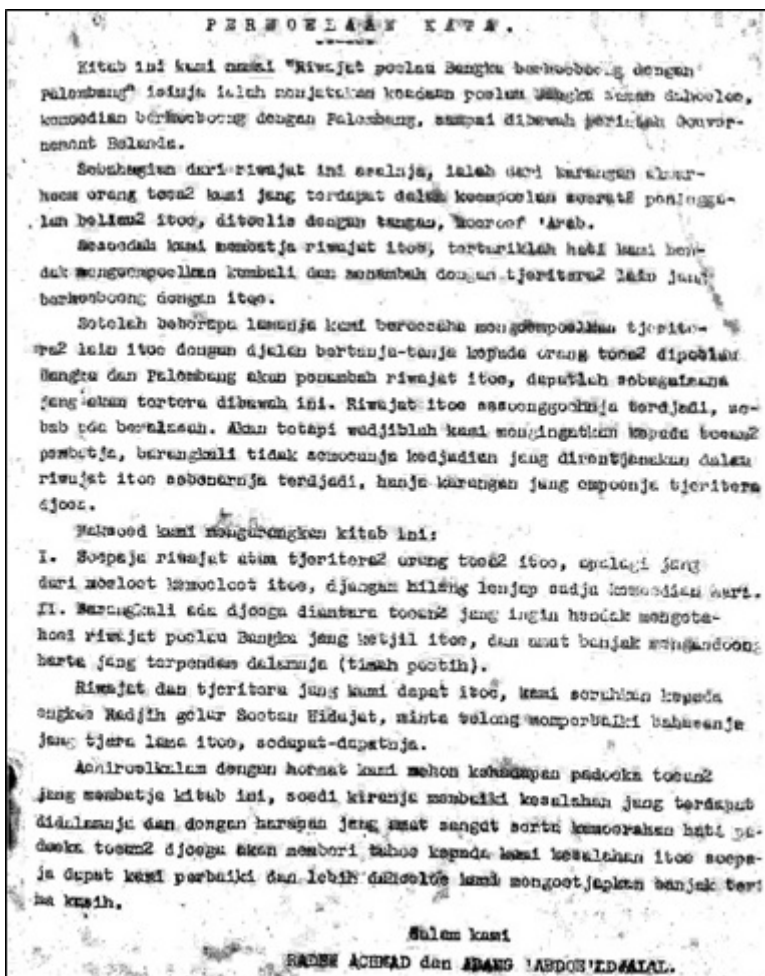
Gambar 2
Halaman sampul Manuskrip
“*Soerat tjerita atsal tanah dan orang jang mendijami tanah Bangka*”



- d. Tulisan Raden Achmad dan Abang Abdul Jalal dengan judul *Riwajat Poelau Bangka Berhoeboeng dengan Palembang*. Tulisan ini diarsipkan oleh KITLV pada tahun 1925 (KITLV H 1.198 1; UBL Cod. 2285).

Gambar 3

Halaman tulisan Raden Achmad dan Abang Abdul Jalal dengan judul *Riwajat Poelau Bangka Berhoeboeng dengan Palembang* (Halaman permulaan kata tulisan Raden Achmad dan Abang Abdul Jalal)



Bulan bulan April 1925 padoaka bulan Rajan Achmad Daming ter
besihidung van den Resident van Bangka en Onderhoorigheden dan teman
Abang 'Abdoeljalul' memberikan kepada hamba "Riwajat poelau Bangka
berbeboang dengan Palembang" karangan almarhoem orang toea2 beliau za-
nan dahoeloe dan beberapa ringkasan tjeritera2 jang beliau dapat sendiri,
jang berbeboang dengan itoe.

Kedoea beliau itoe minta kepada hamba, soepaja soeka menolong
beliau elah memperbaiki bahasannya dan mengarangkan tjeritera jang
beliau dapat selain dari riwajat jang tersebut.

Sebenarnya pengetahuan hamba dari hal kerang mengarang, amat
djoedj sekali dari nama pendai, tetapi sebab permintaan kedoea beliau
itoe dengan bersconggoah hati, ta' patoot peela hamba tolak, maka hamba
oesahkan djoega diri hamba sedapat-dapatnja dengan pengetahuan hamba
jang amat singkat itoe, akan menjerpalkan maksud kedoea beliau itoe.

Hamba berharap soconggoah atas kemoerahan hati padoaka toea2
jang merbatja kitab ini, soedi kiranja memperhatikan kosaluhannya dan
sebagai djalan bahasanya jang tiada dengan sepertinja itoe.

Lebih dahoeloe hamba mohon torima kasih adanya.

Salam dan ta'lim hamba,
RADJIEH gelar SOETAN HIDAJAT.

(Halaman keterangan Radjih gelar Soetan Hidajat tertulis April 1925)

Selain materi di atas, terdapat beberapa tulisan (modern) lain terkait dengan sejarah Pulau Bangka. Arifin Mahmud pada tahun 1986 menulis tiga jilid buku berjudul *Pulau Bangka dan Budayanya*. Rukman Ali, di tahun 1995 menyusun buku berjudul *Pulau Bangka dari Jaman ke Jaman*. Abang Abu (A.A.) Bakar, pada tahun 1995 menulis buku *Bahrin, Amir dan Tikal*.

A.A. Bakar juga adalah pemerhati sejarah dan budaya Bangka yang teliti menyimpan dan mengarsipkan tulisan sejarah termasuk *Riwajat Poelau Bangka* (tersimpan dalam arsipnya dalam bentuk ketikan berhuruf latin). Satu buku yang menjadi rujukan banyak orang tentang sejarah Bangka berikutnya adalah tulisan Sutedjo Sujitno, yang menyusun buku *Legenda Dalam Sejarah Bangka* di tahun 2011 berbasis tulisan dan data sebelumnya termasuk *Tjarita Bangka*.

Selain tulisan penulis lokal, seorang dokter berkewarganegaraan Austria yang pernah bertugas di Bangka; Dr. Epp, pada tahun 1841 menulis *Palembang und Bangka* yang juga patut dicatat sebagai sumber sejarah tentang Bangka. Selain itu juga ada tulisan Woelers M.O., *Het Sultanaat Palembang, 1811-1825*, terbitan S-Gravenhage-Martinus Nijhoff 1975. Catatan serupa yang tak kalah penting untuk melihat Pulau Bangka dalam rekaman bangsa Eropa adalah tulisan (laporan) Residen Inggris M.H. Court; *An Exposition of the Relations of the British Government with the Sultaun [sic] and State of Palembang and the Designs of the Netherlands' Government upon that Country; with Descriptive Accounts and Maps of Palembang and the Island of Banca*, yang dipublikasi pada tahun 1821.

Satu lagi, laporan dengan ulasan panjang hasil penelitian atas Bangka untuk Raffles sewaktu menjabat Letnan Gubernur di Jawa oleh Thomas Horsfield M.D. berjudul *Report on the Island of Banka*. Terbit di *The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* (JIAEA), vol ii, n. vi, pada tahun 1848.

Manuskrip karya Haji Idris adalah sumber (lokal) utama yang dijadikan bahan bagi pengenalan sejarah Bangka. Pada tahun 1890, F.C.A de Clercq menulis *Bijdrage tot de Geschiedenis van het Eiland Banka* (sumbangan bagi sejarah Pulau Bangka) yang merupakan naskah terjemahan dari karya Haji Idris. Bisa dibilang ini adalah penelitian pertama yang membahas manuskrip asal Bangka oleh akademisi Belanda. Penelitian berikutnya yang sering menjadi acuan penelusuran sejarah Bangka adalah Edwin Paul Wieringa, yang pada tahun 1990 menulis disertasi berjudul *Tjarita Bangka, Het verhaal van Bangka*.

Manuskrip tulisan orang Bangka seperti Haji Idris setidaknya menarik beberapa peneliti Belanda lain untuk menggali sejarah atas Pulau Bangka seperti Juynboll, Van Ronkel, Woelders, dan Klinkert. Hingga hari ini, karya Haji Idris terus menjadi acuan bagi sumber awal tulisan sejarah Bangka dari sudut pandang penulis lokal.

Tulisan ini akan fokus kepada manuskrip *Tjarita Bangka I* sebagai referensi utama ditambah dengan manuskrip dan sumber sekunder lainnya. Manuskrip *Tjarita Bangka I* ini adalah tulisan Haji Idris yang ditulis di Mentok pada 17 Ramadhan 1295 H/ 14 September 1878 M, format buku ukuran 25 x 18 cm, ditulis dengan huruf Arab Melayu (Jawi), diarsipkan di KITLV, Leiden-Belanda (dosir Or. 67).

Secara kandungan, manuskrip ini terdiri dari 29 Fasal, 113 halaman, ditulis dalam huruf Jawi, berbahasa Melayu dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi atas Fasal Tjarita Bangka

Fasal	Deskripsi atas Fasal
Fasal 1	Asal mula Bangka, kisah Nahkoda Ranggam
Fasal 2	Asal mula Bangka; cerita orang Maras
Fasal 3	Asal mula Bangka; cerita orang Panji, Belinyu dan Sekak
Fasal 4	Asal mula Bangka; cerita orang Nyalu, Bakung, Gerunggang, dan Jeruk
Fasal 5	Asal mula Bangka; cerita orang Bukit
Fasal 6	Asal mula Bangka; cerita orang Kuba'

Fasal	Deskripsi atas Fasal
Fasal 7	Asal mula Bangka; cerita orang Menduk dan Penagan
Fasal 8	Asal mula Bangka; cerita orang Balar
Fasal 9	Asal mula Bangka; cerita orang Paku'
Fasal 10	Asal mula Bangka; cerita orang Bangka-Akik Antak dan Akik Benu
Fasal 11	Asal mula Bangka; cerita orang Bangkakota, Permisan dan Penyampar
Fasal 12	Asal mula Bangka; cerita orang Punggur
Fasal 13	Simpulan cerita 1-12, di mana tidak memiliki kesamaan cerita. Hanya berbekal sangkaan dan pendapat
Fasal 14	Pengamatan atas lontar, piagam, tembaga, tombak, pedang, meriam dari siantan, sejarah Raja Johor, Palembang dan Jawa, disimpulkanlah cerita Bangka di fasal selanjutnya
Fasal 15	Awal kejadian tanah Bangka; pembentukan tanah
Fasal 16	Awal kejadian tanah Bangka; dua saudara berbuat sumbang-orang yang pertama mendiami Bangka
Fasal 17	Kisah tentang Sawerigading dari tanah Bugis
Fasal 18	Kisah tuan Sulaiman, dan Madjapahit di Bangka

Fasal	Deskripsi atas Fasal
Fasal 19	Tanah Bangka dipimpin oleh patih seperti di Jeruk, Menduk, dan atas perintah Pangeran Dinata Bangka memiliki aturan adat
Fasal 20	Bangka dirusak oleh Raja Tidung dari Melukut. Kerajaan Johor dan Minangkabau, membasminya dan memerintah Bangka
Fasal 21	Bangka di bawah perintah Sultan Banten
Fasal 22	Sultan Banten dan Palembang berperang
Fasal 23	Awal sebab Bangka di bawah Sultan Palembang
Fasal 24	Asal mula bangsawan Melayu tinggal di Mentok
Fasal 25	Kisah tentang Sultan Badarudin Jayawikrama dan asal mula Negeri Mentok
Fasal 26	Mentok dipimpin oleh seorang rangga, dan berlakunya aturan sindang mardika di Bangka
Fasal 27	Mentok dipimpin oleh seorang Temenggung Ditamenggala
Fasal 28	Mentok di masa Temenggung Abang Ismail, kisah Abang Tawi, serangan dari Lingga
Fasal 29	Masa Palembang berperang dengan Inggris, Mentok dipimpin oleh Temenggung Abang Toib, Inggris menguasai Bangka lalu digantikan oleh Belanda, dan kisah pemberontakan Bahrin.

B.3. Bangka dalam Pengaruh Kerajaan-Kerajaan

B.3.1 Bangka di Era Awal (tanpa catatan sejarah)

Sebelum abad ke-6 Masehi, hampir tidak ada catatan dan peninggalan berarti di Pulau Bangka yang dapat memberikan gambaran tentang sejarah Pulau Bangka termasuk tata pemerintahan yang ada. Satu-satunya tinggalan arkeologis di Bangka tertua ada pada abad ke-7 Masehi, yakni prasasti Kota Kapur, sebuah tonggak batu persumpahan dengan tulisan tarikh: “608 Saka, hari pertama paruh terang bulan *Waishaka*” (dikonversi dengan 28 Februari 686 M). Prasasti ini diduga kuat merupakan bukti penaklukan Bangka dari Kedatuan Sriwijaya. Kota Kapur diduga sudah menjadi sebuah tempat dengan masyarakat yang tertata baik, beragama Hindu (memuja Wisnu), dan memiliki teknologi¹.

Bahkan hingga periode akhir Sriwijaya (\pm abad ke-12 Masehi), tidak terdapat sumber tertulis lainnya atas sejarah Bangka. Sebagian besar hanya berupa cerita tutur yang diturunkan secara turun temurun bersumber kepada kepercayaan dan sangkaan. Misalnya dalam Manuskrip *Tjarita Bangka*, mulai fasal pertama hingga fasal kedua belas menuliskan tutur pendapat dan sangkaan yang menjadi kepercayaan masyarakat atas kejadian asal mula Pulau Bangka, mulai dari Nahkoda Ranggan, cerita orang Maras, orang Panji, Belinyu, Sekak, Nyalu, Bakung, Gerunggang, Djeruk, Bukit, Kuba', Menduk, Penagan, Balar, Paku', Bangkakota, Permisan, Penyampar, dan orang Punggur.

¹ Sutedjo Sujitno, *Legenda dalam sejarah Bangka*, hal 64

Lalu pada fasal ketiga belas menyimpulkan cerita tutur dari berbagai daerah di Bangka itu sebagai informasi yang sebagian besar memiliki kesamaan cerita. Penulis Manuskrip *Tjarita Bangka* menggunakan fasal keempat belas untuk menjelaskan metodologi dan sumber referensi data terukur (dengan melakukan pengamatan atas lontar, piagam, tembaga, tombak, pedang, meriam dari Siantan, sejarah Raja Johor, Palembang dan Jawa) untuk menyimpulkan informasi tutur pada fasal-fasal awal yang disajikan pada fasal berikutnya.

Hal ini kemudian dapat kita temukan pada fasal kelima belas dan fasal keenam belas (awal kejadian Tanah Bangka) dan fasal ketujuh belas tentang kisah Sawerigading dari tanah Bugis.

B.3.2 Bangka pada Era Kerajaan Madjapahit

Era ini adalah era pertama yang menunjukkan pengaruh kerajaan besar di Nusantara terhadap corak tata pemerintahan di Pulau Bangka. Dalam *Tjarita Bangka* fasal yang kedelapan belas disebutkan seorang berbangsa Arab bernama Sulaiman datang dan singgah di Menumbing kemudian melanjutkan perjalanan ke Maras. Kemudian di sana ia mengangkat seorang anak dan diberi nama Si Banur yang ketika dewasa dijadikan kepala di daerah itu.

Dalam arsip *Riwajat Poelau Bangka* yang disimpan A.A. Bakar, fasal 4 berjudul *Poelau Bangka dibawah Perintah Radja Madjapahit (± 1320 M)*. Raja Madjapahit mengirim menterinya bergelar Patih Gadjah Mada bersama Tuan Sulaiman memeriksa Pulau Bangka.

Ketika tiba di kaki Gunung Menumbing, didirikan sebuah kampung bernama Ponggor dan diangkatlah seorang kepala. Selain Kampung Ponggor, juga dinamai kampung lain seperti Pandji, Djeruk, di mana di kampung itu juga diangkat seorang kepala, menentukan batas (tanah) dan diatur aturan (adat) untuk memerintah negeri. Setiap kepala kampung itu masing-masing dikaruniai lontar piagam (sepotong) tembaga yang bertuliskan huruf Arab (cap/ stempel).

Dari informasi di atas pada periode ini tata pemerintahan di Pulau Bangka sudah memiliki kepala kampung, yang memiliki legitimasi dari Madjapahit serta memiliki aturan yang baku.

Tjarita Bangka fasal kesembilan belas menyatakan setelah beberapa waktu berlalu barulah Raja Madjapahit menyuruh Pangeran Temenggung Dinata memeriksa keadaan Pulau Bangka, memulai perjalanan dengan menelusur masuk melalui Sungai Bantilan, lalu menuju Mendok dan Djeruk. Pangeran Temenggung Dinata mengangkat seorang patih sebagai kepala di Mendok yang bergelar Patih Tali dan di Djeruk bergelar Patih Pandjang Djiwa dan di bawah patih tersebut diangkat beberapa kepala serta mengajarkan para patih cara mengatur pemerintahan di Tanah Bangka.

Sepeninggalan Pangeran Temenggung Dinata, patih berganti secara turun temurun atau diangkat oleh rakyat setempat. Di Djeruk diangkat seorang patih bernama Raksa Kuning dan hulubalang bernama Selangor. Di Mendok terdapat Patih Ngitjer.

Di daerah Dipak (Depak) bernama Patih Kembar (Gambir), dengan empat orang hulubalang bernama Layang Sedap, Mangadun, Hang Sirat (Mengirat), dan Sekapucik (Hang Kepoetjik). Di Cempurak terdapat Patih Ngabehi. Terdapat satu lagi patih yakni Singa Panjang Jongor yang mendirikan kota di kuala Sungai Menduk (Kota Kapur) yang hanya bercampur (berhubungan/ bergaul) dengan orang Bugis.

Di periode ini terdapat lima patih di Pulau Bangka dengan kepala-kepala yang berada di bawah kepemimpinannya.

B.3.3. Bangka pada Era Kerajaan Johor-Minangkabau

Periode ini dalam *Tjarita Bangka* dimulai pada fasal kedua puluh. Tanah Bangka dirusak oleh serangan Raja Tidung dari Melukut. Dari lima daerah yang dikuasai oleh patih di masa pengaruh Madjapahit hampir bisa dikuasainya. Patih di Menduk dan Patih di Cempurak mati. Patih Tanah Depak dan Djeruk tidak mati namun kampungnya dirusak.

Seorang berbangsa Arab bernama Tuan Sarah yang melihat penderitaan rakyat Bangka melaporkan kejadian itu kepada Sultan Johor. Sultan Johor bermufakat dengan Raja Minangkabau. Sultan Johor menyiapkan angkatan laut dengan Tuan Sarah sebagai laksamananya, Raja Minangkabau menyiapkan angkatan darat dengan hulubalangnya yang bergelar Raja Alam Harimau Garang. Tuan Sarah dan Raja Alam Harimau Garang berkumpul dengan Patih Raksa Kuning dan Hulubalang Selangor. Lalu Tuan Sarah mengerahkan Patih Raksa Kuning dan hulubalangnya membuat kota untuk mengumpulkan rakyat Bangka.

Kota yang dibangun itu adalah Bangka Kota dan Kota Beringin (Waringin). Pasukan Johor dan Minangkabau memukul pasukan Raja Tidung baik di laut maupun di darat hingga aman Tanah Bangka dari bangsa Melukut.

Sejak itu Bangka berada di bawah perintah Sultan Johor. Tuan Sarah menjadi wakil raja yang berkedudukan di Bangka Kota, sementara Raja Alam Harimau Garang berkedudukan di Kota Beringin. Tuan Sarah mengatur adat istiadat pemerintahan negeri dan menyebarkan agama Islam. Mufakat Tuan Sarah dan Raja Alam Harimau Garang beserta Patih Raksa Kuning, orang Melayu (pasukan Johor dan Minangkabau) yang ada di Bangka bebas dari segala pekerjaan negeri, tetapi apabila ada peperangan mereka itulah yang wajib menjadi pasukan/serdadu.

Setelah Tuan Sarah wafat, Pulau Bangka diserahkan Sultan Johor kepada Raja Minangkabau dan diangkatlah Raja Alam Harimau Garang menjadi raja muda dengan berkedudukan di Kota Beringin, yang membawahi Patih Raksa Kuning. Raksa Kuning kemudian menggantikan Raja Alam Harimau Garang yang wafat, lalu ketika Raksa Kuning wafat, Minangkabau tidak lagi mengirimkan wakilnya atas Pulau Bangka sehingga pemerintahan di Bangka kembali kepada kepala kampungnya masing-masing. Bangka kembali dihantui oleh serangan dari luar pulau (lanun/bajak laut).

Tercatat dalam fasal yang kedua puluh, setelah Johor dan Minangkabau tidak lagi memperhatikan Bangka, bajak laut dari Lampung menyerang Bangka.

Disebutkan beberapa tokoh pada era itu antara lain; kepala kampung di Panji bernama Pak Mangil, Maras dikepalai oleh seorang patih bernama Cermin Jati Suara dan dibantu oleh beberapa batin, di Bakung dipimpin oleh seorang batin bernama Nateng Pahlawan (Tiang Pelawan) dengan seorang hulubalang bernama Mintoeh (Mak Mento').

B.3.4. Bangka pada Era Kesultanan Banten

Fasal kedua puluh satu menceritakan periode Pulau Bangka di bawah pengaruh Banten. Pangeran Panembahan Serpu menjadi utusan dan seorang bupati bernama Nusantara yang dijadikan raja muda atas Bangka yang berkedudukan di Bangka Kota. Pangeran dan bupati mengangkat kepada-kepala yang bergelar Patih dan Batin.

Masing-masing patih diberikan piagam (kecuali Patih Poenggoer, Pandji dan Djeruk masih menggunakan piagam lama yang diberikan Madjapahit), ditentukan batas tanah satu patih dengan lainnya dan batas proatin yang ada di bawah patih, mengatur adat istiadat dahulu yang bercampur dengan adat Bugis, Jawa, Melayu, dan lainnya, serta memperbaiki aturan pemerintahan negeri. Sama dengan aturan di periode Johor-Minangkabau, aturan bahwa orang Melayu bebas dari pada pekerjaan negeri melainkan jika terjadi peperangan mereka wajib menjadi serdadu laut dan darat; tetap berlaku.

B.3.5. Bangka pada Era Kesultanan Palembang

Periode ini cukup panjang dikisahkan dalam *Tjarita Bangka*. Mulai dari fasal ke-22 sampai fasal ke-29 (fasal terakhir).

Disebutkan fasal ke-23, pada tahun 1082 H (1666 M) Sultan Palembang (Sultan Abdurrahman, 1659-1706 M) meminang putri dari Bupati Nusantara di Bangka.

Lalu ketika Sang Bupati meninggal, maka Pulau Bangka menjadi pusaka bagi anaknya yang telah menjadi istri Sultan Palembang, dan secara otomatis patih dan kepala lain yang telah ditentukan di era Bupati Nusantara tunduk di bawah Sultan Palembang. Sultan Abdurrahman wafat pada 1706 M, digantikan oleh Sultan Muhammad Masyur (1706 M-1714 M) lalu Ratu Anom Kamaruddin Sri Truno (1714 M– 1724 M).

Manuskrip *Tjarita Bangka* lebih banyak menceritakan hubungan Pulau Bangka dengan Kesultanan Palembang pada era Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama (SMB I) yang menggantikan Ratu Anom Kamaruddin (1724-1758 M). SMB I mendirikan negeri di Mentok.

Keterikatan SMB I dengan keluarga bangsawan dari Pulau Siantan, menjadikan Mentok sebagai pusat pemerintahan di Pulau Bangka yang dipimpin oleh orang-orang dari Siantan. (*Tjarita Bangka* menghususkan mencatat asal-usul bangsawan Melayu yang tinggal di Mentok tersebut dalam fasal ke-24).

Istri SMB I yang berasal dari Siantan bernama Zamnah diangkat sebagai permaisuri bergelar Mas Ayu Ratu. Mertua SMB I yang bernama Wan Abdul Jabar diangkat sebagai penghulu dalam agama Islam di Pulau Bangka (dikenal dengan nama Datuk Dalam).

Sultan pun menetapkan gelar dan pangkat yang dipakai keturunan bangsawan dari Siantan untuk kemudian hari yakni laki-laki bergelar Abang; sama tingginya dengan Mas Agus, untuk perempuan bergelar Yang; sama tingginya dengan Mas Ayu di Palembang. Periode Datuk Dalam ini memulai babak pusat pemerintahan atas Bangka berkedudukan di Mentok.

Sejalan dengan eksplorasi atas timah di Pulau Bangka, sistem pemerintahan di pulau ini melibatkan peran dan fungsi terkait dengan pengaturan tentang penambangan. Sultan memerintahkan seorang Temenggung dari Palembang untuk mengatur pekerjaan timah atas patih dan batin dan berlakulah aturan Timah Tiban. Wan Akub (dibantu oleh Wan Serin) diangkat sebagai kepala di Mentok atas tambang timah membawahi patih dan batin. Sepeninggalnya Wan Abdul Jabar, jabatan hakim agama diserahkan kepada Wan Akub.

Masa berikutnya adalah waktu di mana Mentok semakin ramai dan penambangan timah semakin berhasil. Pada fasal ke-26, kepala di Mentok dipimpin oleh Usman dengan gelar Rangga yang memimpin seluruh Tanah Bangka, setara dengan kedudukan rangga di Palembang. Diangkat juga Muhammad sebagai Datuk Mata-Mata seperti demang di Palembang.

Di masa itu, pembakuan atas aturan semakin terbentuk. Rangga memiliki sepuluh perkara (aturan) atas kewenangan dan hak. Sementara aturan untuk rakyat Bangka yang dikepalai oleh patih, batin, dan kepala di bawahnya diatur dengan aturan 45 perkara yang dikenal dengan Sindang Mardika.

Tata pemerintahan berikutnya berganti. Meningkatnya produksi timah dan berkembangnya Mentok sebagai kota yang ramai berdampak pula kepada pola pemerintahan. Pada fasal ke-27, diangkatlah seorang Temenggung atas Bangka bernama Abang Pahang yang bergelar Temenggung Ditamenggala, yang jabatannya setara dengan Temenggung di Palembang. Temenggung dibantu oleh seorang penghulu dan imam untuk urusan agama Islam, dan seorang jenang dari Palembang untuk urusan penambangan timah di Bangka. Jabatan Patih diganti dengan Depati (setara dengan jabatan Depati Ulu Palembang, lebih kecil dari pangkat Demang) dibantu dengan jabatan Keria dan Ngabehi, Batin Pesirah dan Batin Pengandang mengikuti seperti proatin di Palembang.

Hal baru yang terbentuk dari pola produksi timah di Bangka pada masa ini adalah keterlibatan kelompok Tionghoa. Tercatat seorang pemimpin kelompok Tionghoa bernama Un Asing (di era Rangga Usman) diangkat (dikukuhkan) menjadi Kapiten Cina pada masa Temenggung Abang Pahang yang berkedudukan di Belo-Mentok.

Fasal ke-28 mengisahkan tentang Temenggung Abang Pahang sudah digantikan oleh anaknya bernama Abang Ismail yang bergelar Temenggung Kertamenggala. Pada masa ini Pulau Bangka diserang oleh lanun (perompak laut) sehingga Sultan Palembang memerintahkan Pangeran Adiwijaya memerangi lanun dan berdiam di Toboali. Setiap pangkal di Bangka dipimpin oleh seorang menteri dari Palembang kecuali daerah Mentok.

Merujuk kepada data Horsfield (hal 318), Pangkalpinang dipimpin oleh seorang temenggung bernama Patshienan. Pada masa ini kepala-kepala parit timah diangkat menjadi Kapiten Cina serta kongsi dagang tambang timah diperbolehkan membuat uang picis timah sendiri untuk masing-masing kongsi.

Fasal ke-29, era berikutnya adalah kepemimpinan Abang Toyib sebagai temenggung yang bergelar Temenggung Kertawijaya dibantu oleh Abang M. Saleh sebagai rangga bergelar Rangga Citra Nindata, Abang Yunus sebagai demang bergelar Demang Wirada Perana dan Abang Muhammad sebagai juru tulis. Masa ini adalah masa akhir dari hegemoni kekuasaan Kesultanan Palembang atas Bangka khususnya di Mentok. Inggris menyerang Palembang dan membuat benteng bagi pasukan cadangan di Tanjung Kalian-Mentok.

Setelah Temenggung Kertawijaya lanjut usia dan tidak lagi memerintah, Mentok dipimpin oleh empat orang yakni: Rangga Citra Nindata memimpin Kampung Kranggan dan menjadi Penghulu, Demang Wirada Perana memimpin Kampung Pemohon dan Kampung Patemoen, Abang Kamaludin memimpin Kampung Pekauman Dalam dan Abang Muhammad memimpin Kampung Jiran Peranakan dan Siantan.

C. Analisa

C.1. Pengaruh Sistem Pemerintahan Kerajaan Nusantara (Kerajaan Majapahit Hingga Kesultanan Palembang) Terhadap Tata Pemerintahan Atas Pulau Bangka.

Dalam lintasan sejarah yang diulas dalam pembahasan, secara sederhana terlihat tata pemerintahan di Pulau Bangka dipengaruhi (bahkan tergantung) dengan pola kerajaan yang menguasainya atau pengaruh budaya besar di sekitar yang diadopsi dalam pola pemerintahan di Bangka. Dalam manuskrip *Tjarita Bangka*, alur sejarah yang dituliskan bermula dari era Madjapahit hingga kolonial Belanda, di perang Bangka yang dipimpin oleh Depati Bahrin (berbeda dengan tulisan *Riwayat Pulau Bangka Berhubungan dengan Palembang* yang melanjutkan kisah pemberontakan Amir hingga masa Bangka di era Residen Engeleberg). Pola tata pemerintahan dengan jabatan (birokrasi) di Pulau Bangka di masing-masing periode dapat dilihat di bawah ini.

a) Era Madjapahit

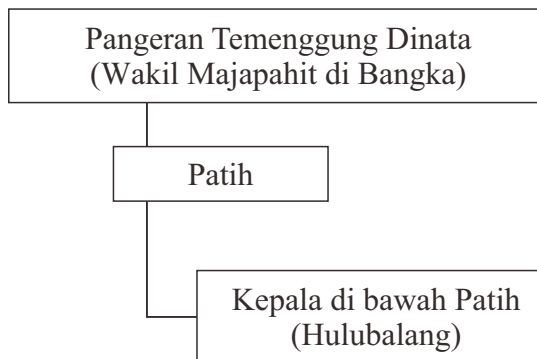
Manuskrip *Tjarita Bangka* memulai fase ini dengan kedatangan seorang Arab bernama Tuan Sulaiman. Dikisahkan ia memberikan nama Menumbing (dari kata “Manumbina” yang berarti tempat perulangan datang), menuju Maras dan menyembuhkan penyakit orang-orang di kampung itu, mengajarkan agama, dan mengangkat anak yang diberi nama “Si Banur”. Kisah ini memberikan deteksi atas mulai masuknya Islam ke Tanah Bangka. Kedatangan kembali Sulaiman (setelah menuju Jawa dan melaporkan situasi Pulau Bangka kepada Raja Madjapahit) berikutnya ke Bangka bersama Patih Gajahmada yang memberikan nama dan mengangkat kepala atas daerah-daerah, yakni Punggur, Panji, Maras (Si Banur sebagai kepalanya), dan Djeruk.

Penggunaan atribut pengangkatan kepala atas daerah itu terdiri dari lontar piagam dari sepotong tembaga yang bertulis huruf Jawa berbahasa Arab, serta menentukan batas dan aturan adat.

Informasi di atas, menyiratkan penggunaan protokoler Madjapahit diterapkan dalam pengangkatan kepala di Bangka. Diasumsikan aturan adat yang dimaksud juga memasukkan pengaruh Madjapahit di dalamnya. Masa pengaruh Madjapahit atas Bangka diprediksi terjadi pada abad ke-14 M.

Di kisah berikutnya Madjapahit mengirimkan Pangeran Temenggung Dinata untuk memeriksa kembali Pulau Bangka. Pangeran Temenggung Dinata mengangkat Patih Tali untuk wilayah Menduk, Patih Panjang Jiwa untuk wilayah Djeruk dan kepala di bawah patih. Secara sederhana, struktur pemerintahan yang dibentuk oleh Temenggung Dinata dapat dilihat pada bagan di bawah ini.

Bagan 1
Struktur pemerintahan Bangka era Majapahit
(Tumenggung Dinata)



Setelah kembalinya Temenggung Dinata ke Pulau Jawa, Madjapahit tidak lagi mengirimkan utusannya ke Pulau Bangka. Temenggung menyerahkan kepemimpinan atas Bangka kepada Patih Tali (Menduk) dan Patih Panjang Jiwa (Djeruk).

Setelah kepemimpinan kedua patih tersebut, jabatan patih berganti secara turun temurun atau diangkat oleh rakyat setempat. Di periode ini terdapat lima patih di Pulau Bangka dengan kepala-kepala yang berada di bawah kepemimpinannya. Lima patih tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: Lima patih tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2
Pemimpin di Pulau Bangka
di bawah pengaruh Kerajaan Majapahit

No.	Daerah	Kepala	
1	Djeruk	Patih Raksa Kuning	Hulubalang Selangor
2	Mendok	Patih Ngitjer	
3	Dipak	Patih Kembar	Hulubalang Layang Sedap
			Hulubalang Mangadun
			Hulubalang Hang Sirat
			Hulubalang Sekapucik
4	Cempurak	Patih Ngabehi	
5	Kota Kapur	Patih Singa Panjang	
		Jongor	
Keterangan: kekuasaan Hulubalang berada di bawah kekuasaan/ kepemimpinan Patih. Pada era ini wilayah Punggur, Panji, dan Maras tidak lagi disebut memiliki pemimpin.			

a.1. Pengaruh Madjapahit dalam Birokrasi

Merujuk tulisan Ahmad Adaby Darban², Kerajaan Madjapahit pada abad 14 M telah memiliki perangkat birokrasi lengkap. Pola pemerintahan Madjapahit menganut konsep kosmogoni. Raja, memiliki otoritas tertinggi dan dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, menjadi pusat pemujaan dan penghambaan rakyat serta mempunyai kharisma yang meluas. Untuk menegakkan kewibawaan politik dan stabilitas kekuasaan raja, birokrasi kerajaan terdiri dari kelompok pejabat kerabat atau bangsawan daerah (yang diduduki oleh kerabat raja) dan kelompok pejabat di luar kerabat atau bangsawan pangkat.

Jabatan yang diduduki oleh kerabat raja antara lain adalah:

- 1) Yuwaraja atau Kumaraja; jabatan bagi putra/ putri mahkota yang kelak disiapkan sebagai calon raja/ ratu.
- 2) Rakyan Mahamantri Katrini; semacam jabatan dewan koordinator menteri, mempunyai kedudukan penting setelah raja (biasanya adalah saudara raja) dan menerima perintah langsung dari raja dan meneruskannya kepada bawahannya yakni Rakyan Mantri Ri Pakirakiran.
- 3) Pahom Narendra atau Bhattara Sapta Prabhu; tujuh orang keluarga raja terdiri dari raja, ayah, ibu, paman, bibi, adik, yang menjabat setingkat lembaga pertimbangan agung kerajaan.
- 4) Paduka Bhattara i atau sering disebut Bhra i (Bhre); merupakan kerabat raja yang menjadi penguasa di daerah. Disebut sebagai raja kecil (kepala daerah).

² Ahmad Adaby Darban, *Bangsawan Jawa dalam struktur birokrasi di Madjapahit*, jurnal *Humaniora* No 9, November-Desember 1998.

Sementara jabatan yang dijabat oleh pejabat di luar kerabat raja antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Rakyat Mantri Ri Pakirakiran; terdiri dari sekelompok pejabat tinggi (seperti dewan menteri/ kabinet) yang berfungsi sebagai badan pelaksana pemerintahan harian. Dipimpin oleh Rakyat Mapatih atau Patih Mangkubumi (seperti Gadjahmada yang mendapat gelar Sang Mahamantri Mukya Rakyat Mapatih). Anggotanya terdiri atas Rakyat Temenggung, Rakyat Demung, Rakyat Rangga, Rakyat Kanuruhan. Khusus menangani bidang militer dijabat Juru Pangalasan.
- 2) Dharmmadyaksa; pejabat tinggi di Madjapahit yang bertugas dalam bidang keagamaan dan hukum. Dharmmadyaksa Ring Kasaiwan bertugas membina kehidupan dan hukum agama Hindu Syiwa sementara Dharmmadyaksa Ring Kasogatan bertugas membina dan menangani bidang hukum dan agama Buddha. Pejabat keagamaan ini dibantu dengan pejabat bawahan yang bergelar Dharma Upapatti.
- 3) Mantri Bhujangga; jabatan untuk kelompok cendekiawan seperti ahli hukum, penyair, ilmuwan yang berada di lingkungan istana. Berfungsi memberikan nasehat dan tuntunan bagi raja.
- 4) Pejabat lain; seperti mantri, mandari, tanda (kepala jawatan), gusti, wadyahaji, dan bhayangkari.

Di luar konteks birokrasi kerajaan di pusaran kekuasaan tingkat atas, kelompok masyarakat kelas bawah (rakyat biasa) di zaman Madjapahit merupakan golongan sosial di luar kelas yang berkuasa. Golongan ini terdiri dari:

- a) Apinghay; kaum putih atau kaum agamawan pedesaan yang bertugas memimpin upacara keagamaan di desa-desa.
- b) Anak Thani; kaum tani yang mempunyai bidang tanah terbatas atau buruh tani.
- c) Bertya; budak atau pekerja kasar.
- d) Empu; pembuat peralatan dan persenjataan.
- e) Lapisan bawah lainnya seperti pedagang, tukang dan golongan paria.

Kehidupan kelompok masyarakat bawah dengan tradisinya ini memiliki perbedaan dengan kehidupan kota dengan tradisinya. Golongan Apinghay sebagai rokhaniawan (biasa disebut Resyi) hidup di luar birokrasi pusat dan daerah.

Berbeda dengan anak Thani dan Bertya yang bekerja dan tinggal di wilayah kekuasaan bangsawan daerah yang memiliki tanah di desa. Komunitas di wilayah tersebut disebut dengan Sima. Memiliki ikatan dengan bangsawan tersebut. Sementara untuk petani bebas yang tidak memiliki ikatan dengan kelompok bangsawan disebut dengan rama yang dipimpin oleh kepalanya yang disebut buyut.

Kelompok pedagang, tukang, dan empu bertempat tinggal di suatu komunitas yang disebut Kalagyan; daerah yang terpisah dari desa.

Golongan terakhir yakni Paria (sebutan dalam stratifikasi agama Hindu), yang juga disebut Candala atau Tutca/ Meleccha adalah golongan yang didiskriminasikan secara sosial. Golongan ini juga disebut wong lembah (orang dengan status terbawah) tinggal di daerah-daerah terpencil.

Potret birokrasi Madjapahit di atas terjadi di Pulau Jawa. Apakah hal itu juga terjadi di Pulau Bangka pada masa penguasaan Madjapahit? Penggunaan gelar jabatan di Pulau Bangka pada era itu dalam *Tjarita Bangka* ada dua; patih dan hulubalang.

Gelar Patih menunjukkan jabatan tersebut bukan digolongkan sebagai gelar bangsawan darah/ pejabat kerabat dari Madjapahit. Merujuk data di atas, penguasa di daerah biasanya bergelar Bhre. Terdapat beberapa data bahwa penggunaan gelar jabatan patih juga diterapkan dalam struktur birokrasi raja-raja kecil di daerah dengan menambahkan kode i. Kode tambahan (i) menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah pejabat di daerah. Contoh: Rakyen Mapatih i Tumampel (berarti ia adalah seorang pejabat patih di daerah Tumampel). Penggunaan gelar patih di Pulau Bangka diduga untuk memberikan jabatan kepada penguasa daerah di luar pusat kerajaan.

Yang menarik adalah gelar Hulubalang. Tidak ditemukan gelar dan pangkat ini dalam birokrasi Madjapahit. Dalam KBBI Hulubalang dapat berarti kepala laskar, pemimpin pasukan, kepala negeri (distrik), prajurit pengawal, atau polisi desa.

Pada abad 15 M, di Kesultanan Malaka pangkat Hulubalang umum digunakan. Sementara di Pulau Jawa, gelar pangkat ini tidak digunakan. Kisah penggunaan gelar ini di Pulau Bangka diduga merujuk kepada pengaruh kerajaan Melayu yang diadopsi dalam tata pemerintahan di Bangka. Dimungkinkan gelar itu adalah gelar yang digunakan oleh yang bersangkutan di daerah asalnya (Sumatera dan sekitar Semenanjung Malaka) tetapi tetap dipergunakan di Pulau Bangka. Ini juga tersirat dari kisah Tuan Sulaiman yang pertama datang dan mendampingi Gadjahmada mengunjungi Bangka.

Fase Bangka di bawah kekuasaan Madjapahit diperkirakan adalah masa yang sama ketika Palembang juga berada dalam perlindungan Madjapahit. Pemimpin di Palembang pada 1455 – 1486 Masehi yang bernama Ario Abdillah (Ariodillah atau Ario Damar) adalah adipati dari Madjapahit.

Pada era ini potensi ekonomi yang dimiliki Pulau Bangka dipandang tidak terlalu besar, sehingga membuat Kerajaan Madjapahit tidak begitu memberikan perhatian khusus terhadap Bangka. Kunjungan Pangeran Temenggung Dinata yang dikirim khusus oleh Madjapahit sebetulnya adalah juga untuk melihat potensi kekayaan Pulau Bangka yang penting bagi Madjapahit. Peninjauan sang pangeran saat itu Pulau Bangka hanya menghasilkan pinang, pakaian kulit, kayu kapur, tikar anyaman, dan produksi hasil ladang. Hasil bumi yang ditimbang tidak begitu penting bagi Madjapahit.

b) Era Kerajaan Johor – Minangkabau

Kerajaan atau Kesultanan Johor didirikan pada 1528 Masehi. Johor sebelumnya adalah bagian dari Kesultanan Malaka yang berakhir pada 1511 Masehi setelah Portugis menaklukan Malaka. Sementara Kerajaan Minangkabau adalah Kerajaan Pagaruyung yang berdiri di wilayah Sumatera Barat saat ini, didirikan oleh Adityawarman pada 1347 Masehi, lalu pada abad ke-17 menjadi kerajaan Islam dan akhirnya runtuh pada masa Perang Padri di tahun 1838 Masehi.

Namun Minangkabau yang dituliskan dalam Manuskrip *Tjarita Bangka* ini diduga bukan merujuk kepada Kerajaan Minangkabau yang berada di Sumatera Barat. Dalam berkas koleksi A.A. Bakar berjudul *Riwayat Poelau Bangka* halaman 8, fasal 6 “Poelau Bangka di bawah perintah Sultan Djohor dan Radja Minangkabau” disebutkan bahwa Sultan Djohor bersahabat dengan Radja Minangkabau di Negeri Sembilan di bawah perlindungan Sultan Djohor.

Cerita tentang orang Minangkabau (seperti dalam *Tambo Minangkabau*) sebagai suku perantau yang melegenda sudah terjadi sejak lama, termasuk perantauan ke Semenanjung Malaka. Negeri Sembilan terletak di Semenanjung Malaka. Saat ini, daerah itu merupakan negara bagian Malaysia, berbatasan dengan Selangor di Utara, Pahang di Timur, Johor di Tenggara, Melaka di bagian Selatan. Nama Negeri Sembilan ini diambil dari nama 'Sembilan Negeri' yang diketuai oleh 'Sembilan Penghulu'.

Periode Pulau Bangka di bawah kekuasaan Kesultanan Johor - Minangkabau (sekitar abad ke-16 M) dalam *Tjarita Bangka* diawali dengan cerita di mana Bangka tidak lagi mendapat perlindungan dari Madjapahit lalu dirusak oleh Raja Tidung (dari Melukut). Dari lima patih yang menguasai Bangka, Patih Menduk dan Cempurak mati, Patih di Djeruk dan Dipak melarikan diri. Semua penduduk kampung meninggalkan daerahnya kecuali Patih Singa Panjang Jongor di Kotakapur. Kedatangan pasukan Johor-Minangkabau di bawah pimpinan Tuan Sarah dan Raja Alam Harimau Garang lalu bergabung dengan pasukan Patih Raksa Kuning dan Hulubalang Selangor. Mengalahkan pasukan Raja Tidung termasuk Patih Singa Panjang Jongor di Kotakapur yang ternyata bersekongkol dengan Raja Tidung.

Tuan Sarah lalu memimpin Bangka dilanjutkan Raja Alam Harimau Garang. Pada era ini, pola pemerintahan atas Bangka masih mempertahankan kedudukan patih, hulubalang (termasuk batin) seperti masa Madjapahit (contohnya Patih Raksa Kuning dan Hulubalang Selangor dari Djeruk).

Tuan Sarah dituliskan menyebarkan agama Islam dari Bangkakota sementara Raja Alam Harimau Garang menetapkan aturan hukum yang berkedudukan di Kotawaringin. Aturan yang berlaku diduga mengadopsi aturan yang bercampur antara Jawa (Madjapahit) dan Melayu. Disebutkan pada fasal kedua puluh bahwa separuh pasukan angkatan laut (Johor) dan darat (Minangkabau) tetap tinggal di Bangka, mereka dibebaskan dari segala pekerjaan, hanya jika ada perang wajib ikut berperang.

Foto 1
Makam Tuan Sarah (Makam Karang Panjang) di Bangkakota



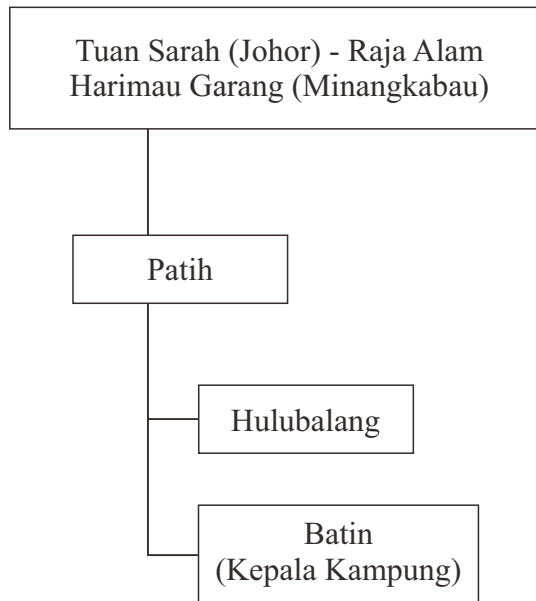
Ketika Raja Alam Harimau Garang menggantikan Tuan Sarah, dia tetap berkedudukan di Kotawaringin. Di masa beliau diketahui bahwa Bangka memiliki kandungan besi atas hasil pemeriksaan Patih Raksa Kuning dengan proatin di sekitar daerah Pakuk.

Foto 2
Benteng tanah (Kute) Kotawaringin



Dapat disimpulkan pada era ini Bangka memiliki pemerintahan bercorak Melayu-Jawa, dengan pola pemerintahan sebagai berikut.

Bagan 2
Struktur pemerintahan di Bangka era Johor-Minangkabau



Setelah periode Raja Alam Harimau Garang, baik Kesultanan Johor maupun Minangkabau tidak tertarik mengirimkan pengganti sebagai pemimpin di Bangka. Sama seperti pandangan Madjapahit, saat itu Bangka dipandang pulau yang tidak memberikan keuntungan besar selain hasil bumi berupa tika, kulit, kapur, dan pinang. Sehingga setelah Patih Raksa Kuning wafat, Bangka hanya dipimpin oleh Batin yang ada di masing-masing daerah.

Tabel 3.
Kepala di Bangka setelah ditinggal pemimpin
dari Kesultanan Johor – Minangkabau

DAERAH	KEPALA
Panji (Belinyu)	Pak Mangil/ Batin Mangil
Maras	Cermin Jati Suara
Bakung (hulu Sungai Baturusa)	Batin Nateng Pahlawan, dibantu oleh hulubalang bernama Mentuh/ Manto'

Di masa ini dituliskan bahwa Pulau Bangka didatangi oleh lanun (perompak laut) dari Lampung yang menipu orang Bangka di Panji. Terjadi perkelahian yang mengakibatkan cedera dan kematian di pihak Lampung. Hal ini kemudian mengakibatkan serangan kembali Lanun Lampung ke Bangka. Panji hingga Maras diserang, orang kampung melarikan diri dan bersembunyi di hutan. Pak Mangil melarikan diri ke Paya Arab, sedangkan Kepala Maras (Cermin Jati Suara) melarikan diri ke Bakung meminta pertolongan kepada Batin Nateng Pahlawan.

Foto 3
Makam Cermin Jati Suara di Bakung, Bakam, Kab Bangka



c) Era Kesultanan Banten

Semula Banten merupakan daerah bagian dari Kerajaan Pajajaran. Raja pertama Banten adalah Sultan Hasanuddin (putra dari Fathahillah) pada 1552 Masehi. Bangka dalam kekuasaan Kesultanan Banten di sekitar 1615 Masehi ketika Banten adalah kerajaan Islam maritim yang kuat di bawah kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa (memerintah dari 1651-1680 M). Wakil Sultan Banten di Bangka saat itu adalah Bupati Nusantara.

Era Banten menguasai Bangka diperkirakan terjadi pada akhir abad 16 Masehi – pertengahan abad 17 Masehi. Secara protokoler pengangkatan tujuh kepala yang bergelar patih dengan batin di era ini sedikit mirip dengan era Madjapahit di mana setiap patih diberikan piagam (kecuali Patih Poenggoer, Pandji dan Djeruk masih menggunakan piagam lama yang diberikan Madjapahit). Hal ini menunjukkan ada hubungan terkait kesamaan pandangan antara kedua kerajaan tersebut. Begitu juga dengan aturan hukum yang diterapkan. Selain menetapkan batas masing-masing kampung, Panembahan Serpu juga menetapkan kembali adat istiadat orang Bangka yang telah bercampur dengan adat Bugis, Jawa dan Melayu.

Kepala-kepala yang bergelar Patih dan Batin sebagaimana berikut.

Tabel 4
Kepala di Bangka pada era Kesultanan Banten

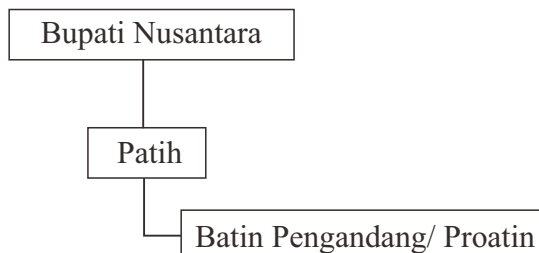
NO.	DAERAH	KEPALA
1	Poenggoer	Seorang patih, dibantu 5 Batin Pengandang
2	Djeboes	Seorang patih, dibantu 3 Batin Pengandang

3	Pandji	Seorang patih, dibantu 5 Batin Pengandang
4	Djeruk	Seorang patih, dibantu 9 Batin Pengandang
5	Mendoek	Seorang patih, dibantu 5 Batin Pengandang
6	Balar	Seorang patih, dibantu 5 Batin Pengandang
7	Pakok	Seorang patih, dibantu 5 Batin Pengandang

Pada fasal kedua puluh satu dituliskan aturan-aturan tersebut bernama Buyung Sumbang, Pelerang Sial, Pemali, Pesembah Pengarah, Pengangkat Kesinggulan, Tapanjing Penawar, Malang Pemutus, Pengarah, dan Pengluput. Ada juga aturan yang berlaku sejak era Johor-Minangkabau di mana orang-orang Melayu dan keturunannya dibebaskan dari pekerjaan negeri melainkan pekerjaan terkait dengan perang baik di laut maupun di darat (secara tidak langsung, seperti Era Johor-Minangkabau, Banten menempatkan orang Melayu sebagai balatentara yang ditugaskan sebagai pasukan jika terjadi perang).

Setelah melakukan pengaturan di Pulau Bangka Panembahan Serpu kembali ke Banten, Bupati Nusantara tinggal di Bangka memimpin para Patih, Batin/ Proatin di seluruh tanah Bangka, dengan struktur pemerintahan sebagai berikut.

Bagan 3
Struktur Pemerintahan Era Kesultanan Banten di Bangka



Data tentang penetapan oleh Panembahan Serpu (tabel 4 di atas) terhadap tujuh patih dengan bawahannya (Batin Pengandang) yang tersebar di seluruh Pulau Bangka ini menarik untuk diperhatikan. Jika Batin Pengandang adalah jabatan atas kepala yang membawahi Proatin (Kepala Kampung), berarti pada masa itu sudah ada 37 Batin Pengandang yang membawahi pemukiman setara dengan kampung di seluruh Bangka (tidak termasuk Bangkakota sebagai pusat pemerintahan). Sebagian besar pemukiman tersebut sudah terbentuk dan tercatat pada periode sebelumnya kecuali daerah di Djeboes dan Balar.

Pada fasal kedua puluh dua, *Tjarita Bangka* mengisahkan peperangan antara Sultan Banten dan Sultan Palembang. Sultan Abdurrahman dari Palembang memerintahkan Pangeran Adi berangkat ke Banten untuk meminang anak Sultan Banten. Setelah persetujuan pertunangan, Sultan kemudian mengutus Pangeran Adi untuk menjemput tunangannya dengan perahu yang indah seperti adabnya menghadap Sultan Banten. Namun kemudian terjadi huru-hara di Pelabuhan Banten oleh rombongan Pangeran Adi yang mengakibatkan utusan Palembang tidak diizinkan masuk.

Pangeran Adi yang sakit hati, merampas dua kapal Sultan Banten yang ada di pelabuhan dan membawanya pulang ke Palembang.

Sultan Banten murka dan memerintahkan anaknya, Ratu Bagus, beserta armada perang Banten untuk menyerang Palembang.

Serangan itu berlangsung selama tiga bulan, mengakibatkan Palembang hampir kalah namun kemudian mendapat pertolongan dari anak-anak Sultan Palembang dari Bukit Siguntang.

Ratu Bagus mundur dengan terburu-buru dan singgah di Pulau Nangka. Bupati Nusantara yang mengetahui hal tersebut segera menemui Ratu Bagus di Pulau Nangka, tinggal bersama selama tiga bulan di sana. Ratu Bagus berkeinginan menyerang kembali Palembang dan berkirim surat kepada Sultan Banten agar dikirimkan bantuan untuk penyerangan tersebut.

Setelah berkirim surat ke Banten, Ratu Bagus memasuki Bangka, tinggal di Bangkakota bersama Bupati Nusantara, menyiapkan peralatan perang sambil menunggu bantuan dari Banten. Ratu Bagus sempat memberikan sumpah kepada Bupati Nusantara agar tidak “berhati dua” dengan Sultan Palembang. Namun selama tinggal di Bangka bantuan dari Banten tidak kunjung tiba, dan Ratu Bagus meninggal, dimakamkan di Bangkakota (dikenal dengan Keramat Ratu Bagus).

Yang dikisahkan pada fasal kedua puluh dua di atas, secara terang memberikan informasi bahwa ada dua kekuasaan besar di sekitar Bangka yang sangat berpengaruh. Banten dan Palembang. Fasal ini yang kemudian menjadi “jembatan” bagi fasal kedua puluh tiga, bagaimana kemudian Palembang beralih menguasai Pulau Bangka dari kekuasaan Banten.

d) Era Kesultanan Palembang Darussalam
(± akhir abad 17 - 1812 M)

Mengutip tulisan Dr. Husni Rahim; *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Seri Teri Buana menjadi Raja Palembang pada sanat 575 Hijriah (1179 Masehi). Palembang menggantikan kerajaan Sriwijaya yang melemah dan dikalahkan oleh Madjapahit. Adipati Madjapahit yang berkuasa di Palembang adalah Ario Damar.

Kekuasaan Madjapahit yang digantikan oleh Demak pada abad 16 Masehi membawa Palembang dalam perlindungan Demak dan Pajang, lalu pada Mataram (Islam) pada pertengahan abad ke-17 Masehi.

Palembang menjadi kesultanan yang berdiri sendiri pada masa pemerintahan Ki Mas Endi yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Saidul Imam pada tahun 1659 Masehi.

Berikut Ringkasan Raja dan Sultan Palembang³:

NO.	RAJA/ SULTAN	PERIODE
I	Adipati Madjapahit di Palembang	
1	Ario Abdillah (Ariodillah/ Ario Damar)	1455 – 1486
II	Penguasa Demak-Pajang di Palembang	
1	Pangeran Sido Ing Lautan	1547 – 1552
2	Kyai Gede Ing Suro Tuo	1552 – 1573
3	Kyai Gede Ing Suro Mudo	1573 – 1590

³ Disarikan dari buku Dr. Husni Rahim, Hal 286-288.

4	Kyai Mas Adipati	1590 – 1595
III	Penguasa Mataram di Palembang	
1	Pangeran Madi Ing Angkoso	1595 – 1629
2	Pangeran Madi Alit	1629 – 1630
3	Pangeran Sedo Ing Puro	1630 – 1639
4	Pangeran Sedo Ing Kenayan	1639 – 1650
5	Pangeran Sedo Ing Pasarean	1651 – 1652
6	Pangeran Sedo Ing Rajek	1652 – 1659
IV	Kesultanan Palembang	
1	Kyai Mas Endi (Sultan Abdurrahman)	1659 – 1706
2	Sultan Muhammad Mansyur Jayo In Lago	1706 – 1714
3	Sultan Komaruddin Sri Truno	1714 – 1724
4	Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikromo	1724 – 1758
5	Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo	1758 – 1776
6	Sultan Muhammad Bahauddin	1776 – 1803
7	Sultan Mahmud Badaruddin II	1803 – 1812
8	Sultan Ahmad Najamuddin (Husin Diauddin)	1812 – 1813
9	Sultan Mahmud Badaruddin II	13 Juli- 14 August 1813
10	Sultan Ahmad Najamuddin (Husin Diauddin)	14 August 1813- 23 Juni 1818
11	Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin memerintah bersama	23 Juni 1818- 30 Okt 1818
	Sultan Ahmad Najamuddin turun dari tahta dan dibuang ke Cianjur	30 Okt 1818

12	Sultan Mahmud Badaruddin II	30 Okt 1818- 1 Juni 1821
13	Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu	1 Juni- 1 Juli 1821
14	Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom	16 Juli 1821- 19 Sept 1825
	Kesultanan Palembang dihapuskan Belanda	1825

Wilayah Kesultanan Palembang meliputi wilayah segala huluhan Batanghari Sembilan (daerah sembilan sungai utama yang hampir semuanya bermuara ke Sungai Musi) dan negeri di luar termasuk Pulau Bangka dan Belitung⁴ (dalam *Tjarita Bangka* pengaruh Kesultanan Palembang atas Bangka bermula dari cerita Sultan Abdurrahman meminang putri Bupati Nusantara yang tinggal di Bangka di awal abad ke 18 Masehi).

Penduduk Kesultanan Palembang dibedakan atas penduduk asli dan pendatang (orang Arab, Cina, Hindustan dan Eropa). Penduduk asli dapat dikelompokkan dalam penduduk di ibukota Palembang (sebagai pusat kesultanan) dan penduduk daerah pedalaman. Lalu penduduk kota dibagi menjadi dua golongan; golongan priayi dan golongan rakyat. Golongan priayi adalah golongan keturunan sultan atau kaum ningrat. Golongan ini terdiri dari tiga tingkatan: Pangeran, Raden, dan Masagus.

Pangeran berarti yang memerintah. Gelar yang biasa diberikan kepada anak laki-laki sultan. Dalam kebiasaan adat Melayu-Jawa, gelar pangeran yang tertinggi adalah Pangeran Ratu (putra mahkota).

⁴ Dr. Husni Rahim, Hal 58.

Raden artinya yang dijunjung atau dicintai. Gelar ini diberikan kepada anak laki-laki dari hasil perkawinan pangeran dengan anak perempuan seorang pangeran. Masagus artinya berharga banyak. Gelar ini diberikan kepada anak laki-laki dari hasil perkawinan seorang pangeran atau raden dengan perempuan dari golongan rakyat.

Sementara gelar untuk perempuan ningrat adalah Ratu (untuk istri Sultan), Raden Ayu (sering disingkat Denayu) bagi istri dan anak perempuan dari Pangeran dan Raden, sedangkan istri dan anak perempuan dari Masagus disebut Masayu.

Golongan berikutnya adalah golongan rakyat yang juga dibagi ke dalam tiga tingkatan yakni Kemas, Kiagus, dan rakyat kebanyakan.

Kemas adalah gelar yang diberikan kepada anak laki-laki dari perkawinan seorang Masayu dengan seorang pria dari rakyat kebanyakan. Kiagus adalah gelar yang diberikan kepada anak laki-laki dari mantri dan turunan raden yang terendah dengan rakyat kebanyakan.

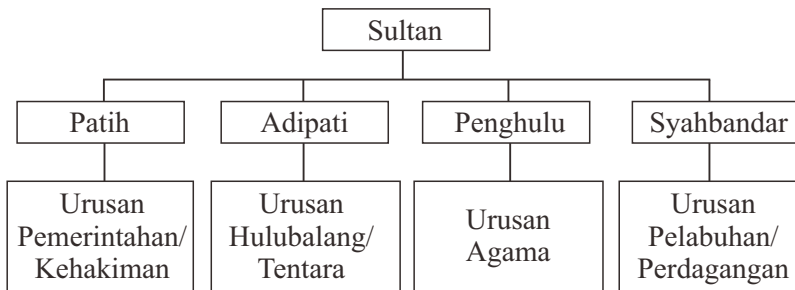
Rakyat kebanyakan pun dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan: orang Miji (kelompok yang dipergunakan untuk berperang atau kelompok ahli, seniman, pengrajin yang dipergunakan oleh Sultan), orang Senan (orang yang dipekerjakan oleh Sultan), orang yang menggadaikan diri, dan budak.

Dengan komposisi penduduk yang dijelaskan di atas, struktur pemerintahan Kesultanan Palembang dibagi atas pemerintahan di ibukota dan di daerah pedalaman (uluan).

Pemerintahan di uluan dibagi dalam tiga bentuk wilayah pemerintahan yakni; daerah *sikap* (kelompok dusun yang bukan marga dan diperintah langsung oleh pegawai kesultanan), daerah *kepungutan* (daerah pedalaman yang dipimpin oleh *rabun* atau *jenang*, daerah yang wajib memberikan pajak/ upeti atas hasil bumi kepada Sultan), dan daerah *sindang* (daerah perbatasan dengan daerah kepungutan, yang dibebaskan untuk mengatur daerahnya sendiri, dipimpin oleh seorang depati).

Pusat pemerintahan di ibukota berada langsung di bawah Sultan. Pelaksanaan tugas harian pemerintahan biasanya dilakukan oleh Putra Mahkota (Pangeran Ratu) dibantu oleh empat *mancanegara* (pembesar kesultanan) sebagai bagian dari *Pancalang Lima* (suatu lembaga di Kesultanan Palembang yang mengikuti pola Madjapahit yang telah diberi corak Islam yaitu 5 penguasa yang terdiri dari susuhunan/ sultan, adipati, pepatih, guru/ penghulu, dan hakim/ jaksa). Tetapi di Palembang, posisi hakim/ jaksa lebih banyak digantikan oleh Syahbandar untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan perdagangan.

Bagan 4
Struktur Pemerintahan Kesultanan di ibukota Palembang

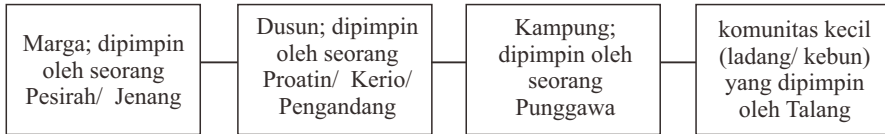


Masing-masing mancanegara di atas mempunyai jajaran pegawai kesultanan yang terdiri dari:

- a. Pada urusan pemerintahan/ kehakiman di bawah Patih terdiri dari pegawai tinggi (pangeran, raden, dan kiagus), pegawai rendah (diberi gelar temenggung, rangga, demang, dan ngabehi).
- b. Pada urusan hulubalang terdiri dari para hulubalang dengan laskar kesultanan berbagai tingkatan di bawah komando Adipati.
- c. Pada urusan agama yang dipimpin oleh Pangeran Penghulu Nata Agama terdiri dari pejabat-pejabat agama yang terdiri dari khatib penghulu, khatib imam, khatib, dan Modin.
- d. Pada urusan pelabuhan/ perdagangan terdiri dari pejabat dan pegawai pelabuhan yang dikepalai oleh Syahbandar.

Sementara pemerintahan di daerah pedalaman tersusun dari marga, dusun, kampung, dan talang. Pengaturan pembagian daerah pedalaman ditentukan dalam Undang-Undang Simbur Cahaya tentang aturan marga, di mana marga dipimpin oleh seorang pasirah. Marga membawahi dusun yang dipimpin oleh seorang proatin atau kerio atau pangandang, sementara dusun tempat tinggal pasirah dipimpin oleh seorang pembarap yang bertugas sebagai pembantu pasirah. Di bawah dusun, terdapat kampung yang dikepalai oleh seorang punggawa dan struktur terendah adalah kelompok kecil penduduk yang tinggal di kebun atau ladang pada masa tertentu, dipimpin oleh seorang talang.

Bagan 5
Struktur Pemerintahan di Daerah Pedalaman dan Sindang



Perkembangan politik, wilayah, komposisi penduduk, strata sosial, struktur pemerintahan dan aturan hukum di Palembang sebagaimana diuraikan di atas ikut memberikan pengaruh atas posisi Pulau Bangka di kemudian hari sebagai bagian wilayah Kesultanan Palembang. Sejak pemerintahan Sultan Abdurrahman (1659 – 1706 M), Pulau Bangka mulai tercatat masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang. Dalam *Tjarita Bangka*, hal ini terdapat pada fasal kedua puluh tiga yang mengisahkan asal sebab Bangka di bawah perintah Sultan Palembang.

Tiga belas tahun setelah peperangan antara Banten dan Palembang (setelah kematian Ratu Bagus di Bangka) dan Sultan Banten pun telah berganti, Sultan Abdurrahman (Palembang) bermaksud meminang putri Bupati Nusantara di Bangka. Diutus wakilnya dengan tiga perahu kerajaan menuju ke Bangkakota. Bupati Nusantara menerima utusan itu namun belum dapat menjawab pinangan Sultan Palembang, di mana ia akan bersurat (meminta izin) dahulu kepada Sultan Banten. Sultan Palembang lalu mengirimkan lagi utusan untuk mengundang Bupati Nusantara masuk ke Palembang karena Sultan ingin berbicara langsung kepadanya.

Bupati Nusantara berada di posisi yang sulit. Jika ia tidak menuruti kehendak Sultan Palembang dikhawatirkan akan terjadi peperangan. Jika ia menuruti kehendak itu, ia takut atas sumpah yang pernah diberikan oleh Ratu Bagus kepadanya. Hal itu disampaikannya kepada utusan dengan kalimat yang tertulis dalam *Tjarita Bangka*; “*bahwa sudah ditentukan dalam persumpahan jangan kita (Bupati Nusantara) masuk Palembang, minum yang keluar dari Sungai Palembang*”.

Sultan Palembang yang mengetahui hal itu kemudian mencarikan tempat yang dekat dengan Bangkakota, airnya tidak berasal dari Sungai Palembang. Didapatlah suatu tempat; Sungai Pasugin. Lalu Sultan membangun pesangrahan di situ dan mengundang Bupati Nusantara untuk datang. Sultan Palembang menganggap tempat ini adalah tempat yang terhindar dari sumpah Ratu Bagus sehingga tidak ada alasan baginya untuk menolak.

Bersamaan dengan itu datang balasan dari Banten yang mengizinkan Bupati Nusantara untuk mengambil keputusan sendiri atas permintaan Sultan Palembang itu. Kejadian dicatat terjadi pada tahun 1666 Masehi. Pernikahan atas Sultan Abdurrahman dengan putri Bupati Nusantara⁵ (dari Kesultanan Banten) sebagai penguasa Bangka, memudahkan peralihan penguasaan atas Pulau Bangka dari Kesultanan Banten ke Kesultanan Palembang tanpa perselisihan. Bangka hanya beralih perlindungan.

⁵ Dalam tulisan Frawita Sari; “Sistem kekerabatan Sosial Masyarakat dalam penggunaan gelar kebangsawanan Yang dan Abang di Kota Muntok Kepulauan Bangka (1734-1816)”, 2015, putri Bupati Nusantara yang dimaksud bernama Khadijah.

Kepala-kepala pemerintahan di Bangka pada era Banten seperti Patih dan Batin, setelah meninggalnya Bupati Nusantara, tunduk kepada Sultan Palembang. Tidak ditemukan perubahan signifikan atas Bangka pada era ini, bahkan setelah wafatnya Sultan Abdurrahman dan digantikan oleh Sultan Mansyur Jayo In Lago (1706 – 1714 M), dilanjutkan kepada Sultan Komaruddin Sri Truno (1714– 1724 M).

Bangka yang masuk dalam kelompok struktur pemerintahan daerah pedalaman/ uluan, berbeda dengan daerah sikap dan kepungutan. Sebagai daerah sindang; daerah perbatasan dengan daerah kepungutan, Bangka dipimpin oleh seorang Depati (raja kecil) yang bebas, tidak dibebani pajak dan tidak pula membayar upeti⁶ tetapi wajib melindungi perbatasan kesultanan dari serbuan orang luar⁷. Perubahan baru terlihat pada masa Pulau Bangka (dan Belitung) dikenal sebagai daerah penghasil timah Kesultanan Palembang yang mendatangkan banyak keuntungan sehingga mulai mendapat perhatian dan perlakuan khusus dalam tata pemerintahan. Dimulai di masa Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama (1724 – 1758 M), di Bangka didudukkan seorang wakil sultan dengan gelar hakim yang merangkap sebagai penghulu dalam perkara-perkara yang menyangkut hukum Islam.

⁶ Namun ketika Timah ditemukan dan menjadi komoditi penting bagi Palembang, ditetapkan aturan Timah Tiban bagi orang Bangka.

⁷ Praktek atas fungsi ini kemudian diperankan oleh Temenggung Dita Menggala (Abang Pahang, 1755 – 1785 M), di mana pada masa Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo, beliau pernah mempersiapkan angkatan laut kesultanan untuk menjaga perairan Pulau Bangka dengan mendirikan sebuah benteng di Mentok. Palembang yang sedianya akan berusaha diserang oleh pasukan Raja Haji dari Riau, namun dengan kepiawaian Temenggung di Mentok (Abang Pahang) melakukan diplomasi, akhirnya Raja Haji mundur dan tidak jadi menyerang Palembang.

Kepala pemerintahan atas Bangka dijabat oleh seorang menteri rangga dibantu oleh seorang datuk mata-mata yang berkedudukan di Mentok. Hubungan Kesultanan Palembang pada masa kepemimpinan Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama dengan pemimpin Pulau Bangka dikisahkan dengan dramatik dalam manuskrip *Tjarita Bangka*.

Pada fasal yang kedua puluh lima, dikisahkan Raden Lembu (Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama) dan kakaknya Pangeran Mangkubumi menuntut takhta yang diwasiatkan bagi mereka kepada Sultan Komaruddin. Tuntutan mereka ditolak, kedua kakak beradik itu kemudian keluar dari Palembang.

Berlayar ke Bangka hingga ke Kerajaan Johor untuk mencari bantuan menyerang Palembang. Di sana mereka diterima secara baik oleh Sultan Johor, tinggal selama tiga bulan, namun mendapat kecemburuan dan ketidaksukaan dari para pejabat, menteri, hulubalang di Kesultanan Johor. Raden Lembu dan kakaknya akhirnya terusir dari Johor dan akhirnya sampai ke Pulau Siantan (bagian dari Kepulauan Anambas – Kepulauan Riau) yang dikepalai oleh Wan Akub.

Di Pulau Siantan Raden Lembu menemukan seorang perempuan bernama Zamnah, anak dari Wan Abdul Jabar. Atas izin Sultan Johor, Raden Lembu menikahi Zamnah dan tinggal beberapa waktu di pulau itu sambil mencari dukungan pasukan untuk menyerang Palembang.

Atas pertolongan Wan Akub, dikumpulkan beberapa orang Melayu dan seorang pemimpin peranakan Bugis bernama Daeng Berani, bersama armada berjumlah 40 kapal (di luar armada pasukan Raden Lembu) berlayar dari Siantan untuk menyerang Palembang dengan terlebih dahulu singgah di Bangkakota untuk mempersiapkan pasukan.

Kejadian ini dicatat terjadi pada tahun 1711 Masehi. Dari tempat ini Raden Lembu mengirimkan surat rahasia atas rencana menyerang Palembang kepada sekutunya yang berada di Palembang untuk mengetahui penjagaan dan pertahanan di Palembang sampai Sungsang. Sementara perahu Wan Akub, Wan Serin, dan Wan Sabar berlabuh di Sungai Ulim Bangka dan tanpa sengaja menemukan kandungan timah yang sama dilihatnya di Negeri Johor.

Ketika tiba di Bangkakota, temuan itu dilaporkan kepada Raden Lembu. Beliau sangat senang dan memerintahkan bawahannya untuk memeriksa secara diam-diam di daerah mana saja yang memiliki kandungan timah. Sekitar tiga bulan berada di Bangkakota, persiapan armada sudah hampir sedia semua. Pada suatu malam, Zamnah; istri Raden Lembu membangunkan suaminya dan menyampaikan mimpinya; *“Jikalau Sultan mau menjadi raja antero Palembang baiklah di dalam waktu ini juga berangkat sebab istrinya dapat mimpi dan menelan antero Palembang”*. Sultan awalnya kurang percaya namun terus diyakinkan oleh istrinya. Maka Sultan bersama istrinya, berbekal sebuah sekin keramat dari mertuanya keluar dari Bangkakota diikuti sebagian pasukan menuju Palembang.

Mula-mula memasuki Sungsang, mendapat tembakan peringatan dari menteri dan hulubalang yang menjaga pos di situ. Sultan memerintahkan untuk tidak membalas, lalu ia keluar dan bersama istrinya duduk di beranda kapal. Hal ini membingungkan pasukan penjaga. Mereka mengira : *“Barangkali ini Sultan Ratu Mahmud Badaruddin masuk bukan mau memukul Palembang (sebab) ia cuma sebuah perahu dan lagi dia tidak membalas tembakan peringatan, dan duduk bersama istrinya di beranda. Barangkali dia masuk dengan hal yang baik. Rujuk dengan saudaranya”*.

Lalu mereka berhenti berjaga, meninggalkan pertahanan dan ikut mengiringi perahu Sultan. Hal yang sama dilakukan di setiap pos penjagaan sepanjang sungai dan masuk Palembang dengan beriringan beramai-ramai. Orang-orang di Palembang heran karena Sultan dapat masuk tanpa pertempuran dan berbondong-bondong menyambut kedatangan Sultan. Langkah awal yang cerdas untuk memaksa Sultan Komaruddin yang berkuasa atas Palembang memperhitungkan kembali kedudukan keponakannya itu dalam pemerintahan di Palembang.

Sebuah kisah yang memberikan arti penting peran orang Siantan atas keberhasilan Raden Lembu menjadi Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama yang berkuasa atas takhta Palembang. Setelah berkuasa atas takhta Palembang, Sultan memanggil Wan Akub serta saudaranya di Bangkakota ke Palembang.

Sebuah kisah yang memberikan arti penting peran orang Siantan atas keberhasilan Raden Lembu menjadi Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama yang berkuasa atas takhta Palembang. Setelah berkuasa atas takhta Palembang, Sultan memanggil Wan Akub serta saudaranya di Bangkakota ke Palembang.

Sultan mengumpulkan Raja, Menteri, Hulubalang, dan mengangkat istrinya (Zamnah) sebagai Mas Ayu Ratu serta menetapkan pangkat (gelar) kepada segala sanak saudaranya dan keturunannya dengan gelar “Yang” untuk perempuan dan “Abang” untuk laki-laki. Gelar ini sama dengan gelar Mas Ayu untuk Yang dan Mas Agus untuk Abang. Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama pernah berjanji kepada bangsawan Siantan apabila membantu dan berhasil untuk merebut takhta Palembang, akan diberi hadiah sebagian Tanah Bangka. Sehingga, sesuai dengan janjinya keluarga Zamnah ditempatkan di Pulau Bangka yang dekat dengan Palembang yaitu Mentok.

Letak Mentok yang berada di tengah-tengah persimpangan jalan antara Palembang dan Siantan dipandang strategis. Sultan memerintahkan menterinya ditemani Wan Akub dan keluarga Siantan untuk mendirikan tempat tinggal di Mentok dengan bantuan lima orang proatin dari Punggur dan Sukal untuk mengerahkan orang Bangka membangun kota Mentok. Tujuh bubung rumah segera dibangun lalu Sultan memerintahkan pegawai kerajaan untuk menjemput keluarga Zamnah lainnya yang berada di Siantan.

Mengutip Barbara Watson Andaya, hal itu terjadi pada bulan September 1734 Masehi yang tercatat dalam laporan VOC dari loji Palembang ke Batavia dalam VOC 2325 tanggal 31 Oktober dan VOC 2345 tanggal 1 Desember.

Wan Abdul Jabar, mertua Sultan Mahmud Badaruddin diangkat menjadi penghulu yang bertugas sebagai hakim agama berkedudukan di Mentok bergelar Datuk Temenggung Prabu Nata Menggala atau dikenal masyarakat Bangka dengan Datuk Dalam Hakim (Arifin Mahmud: 35). Wan Akub yang memiliki pengetahuan tentang penggalian timah ditunjuk sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Bangka serta kepala urusan penambangan timah yang memiliki kewenangan mengorganisasikan penggalian timah, bergelar Datuk Rangga Setia Agama.

Mentok mulai berkembang sebagai pusat pemerintahan atas Bangka. Peraturan timah tiban mulai diberlakukan bagi orang Bangka namun tidak memberikan hasil yang diharapkan. Atas usulan Wan Akub, Wan Serin (bergelar Datuk Kungsi Pahlawan Bumi, Laut, Darat⁸) ditugaskan berangkat ke Johor mencari orang-orang Cina, Siam, Kamboja yang berada di Johor yang biasa menambang timah untuk didatangkan ke Bangka.

Sultan Palembang juga memerintahkan seorang bernama Bong Hu But mencari tenaga kerja Cina untuk bekerja di Bangka. Dimulailah masa di mana tambang timah Bangka dibuka dengan masif. Mentok mulai berkembang dengan pesat.

⁸ Lihat Arifin Mahmud, *Pulau Bangka dan Budayanya*, jilid I, halaman 41

Sultan Palembang juga memerintahkan seorang bernama Bong Hu But mencari tenaga kerja Cina untuk bekerja di Bangka. Dimulailah masa di mana tambang timah Bangka dibuka dengan masif. Mentok mulai berkembang dengan pesat.

Wan Akub dan Wan Serin wafat dalam usia lanjut dimakamkan di pekuburan Kute Seribu Mentok. Seorang anak dari Wan Serin bernama Wan Aji (Datuk Aji) menggantikan Wan Serin menjadi Kepala Kerja Parit (tambang) Timah di Ulim (Bangka bagian selatan).

Bagan 6
Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang di Bangka
(Masa Kepemimpinan Wan Akub, ± 1734 – 1746 Masehi)

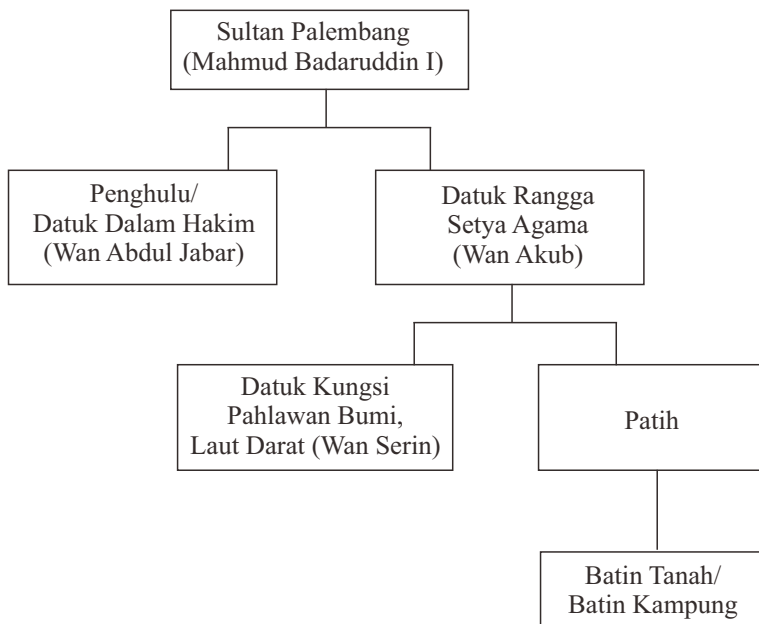


Foto 4
Makam Datuk Dalam (Wan Abdul Jabar)
di Pekuburan Kute Seribu.



Sumber: Dokumentasi Cagar Budaya dan Situs Bangka Belitung

Fasal kedua puluh enam mengisahkan sepeninggalan Wan Akub dan Wan Serin, Sultan Palembang memilih lagi dari keturunan Wan Abdul Hayat untuk menjadi pemimpin pemerintahan di Bangka. Wan Usman (Wan Datuk Aji), anak dari Wan Serin dipilih menjadi kepala yang berkuasa penuh untuk seluruh Pulau Bangka dengan gelar; Menteri Rangga, setara dengan kedudukan dan pangkat dengan Menteri Rangga yang ada di Palembang.

Wan Muhammad (Tuk Amat Muhammad) diangkat sebagai Datuk Mata-Mata, yang memiliki kedudukan dan pangkat setara dengan Demang di Palembang di mana ruang lingkup penugasannya khusus untuk wilayah Negeri Mentok saja.

Keduanya diundang oleh Sultan ke Palembang juga beserta para kepala kampung di Bangka untuk dikukuhkan dan diangkat secara resmi dalam suatu upacara yang dihadiri oleh para pejabat dan pembesar Kerajaan Palembang, dilengkapi dengan tanda atas peresmian di mana Sultan menganugerahkan kopiah yang terbuat dari emas, sebilah keris, empat barang tombak dan sebuah ipuh.

Pada kesempatan itulah kemudian Sultan Mahmud Badaruddin I menetapkan peraturan yang dijadikan dasar atas kekuasaan bagi Menteri Ranga Usman untuk melaksanakan tugas pemerintahan di Pulau Bangka. Peraturan itu terdiri dari sepuluh fasal, menitikberatkan kepada aturan tentang kewajiban dan hak Menteri Ranga sebagai kepala pemerintahan di Bangka (termasuk bertindak sebagai hakim agama dan menetapkan Khadi, Khatib dan Modin).

Selain itu Sultan juga menerapkan aturan bagi seluruh Tanah Bangka. Aturan itu sebetulnya merupakan penyempurnaan adat istiadat rakyat Bangka yang sebelumnya sudah ada. Penyempurnaan ini dipandang perlu untuk memperbaiki, menambah maupun mengurangi aturan-aturan yang dianggap sudah tidak sesuai dan menjadi lebih baik. Aturan ini berjumlah 45 fasal (sebagian orang menyebut 45 fasal itu dengan nama Sindang Mardika, hukum adat atas Bangka di era Kesultanan Palembang), berlaku bagi seluruh rakyat Bangka (kecuali orang Melayu) dan wajib diterapkan oleh semua kepala kampung di Bangka.

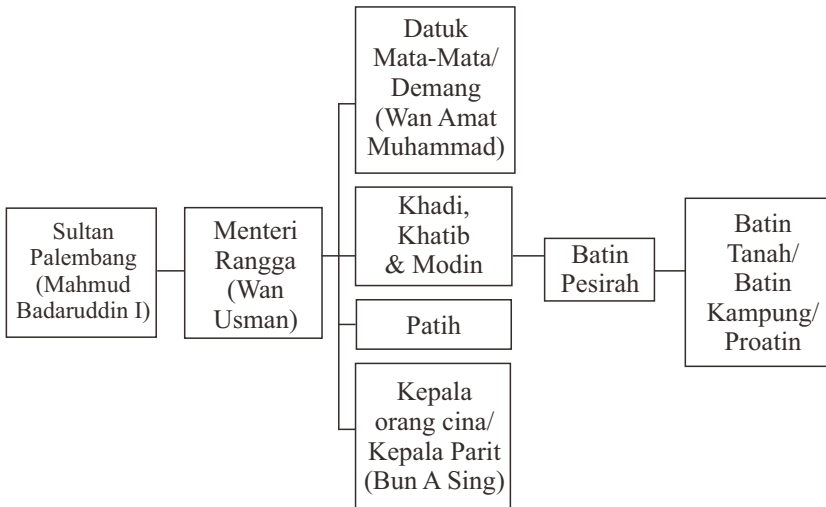
Pada fase ini, Bangka sudah memiliki pemerintahan dan sistem hukum yang baik dengan penyebaran agama Islam yang semakin luas. Tambang-tambang timah juga berkembang dengan pesat dan semakin meluas ke wilayah lain di Bangka. Orang Melayu, Cina, dan Siam mengerjakan parit timah hingga wilayah Tempilang. Mentok sebagai ibukota pemerintahan berkembang paling pesat. Berbarengan dengan kemunculan pangkal atau negeri di Bangka yang mulai ramai dan dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan.

Di masa kepemimpinan Menteri Ranga Usman ini produksi timah Bangka memberikan sumbangan yang besar bagi Kesultanan Palembang, Negeri Mentok berkembang dengan pesat dan menjadi kota yang ramai dengan lalu-lalang kapal dagang dari berbagai negeri singgah ke kota ini.

Di sisi lain, kejayaan timah Bangka mengundang praktek perampokan (oleh bajak laut/ lanun) dan penyelundupan timah untuk dijual kepada pihak lain di luar penguasaan Kesultanan Palembang. Salah satu kisah yang terkenal adalah praktek kecurangan yang dilakukan oleh seorang kepala tambang dari keturunan Cina yang diangkat oleh Menteri Ranga Usman yang bernama Oen A Siang (Bun A Sing).

Sultan Mahmud Badarudin I wafat pada 1758 Masehi dan digantikan oleh Sultan Ahmad Najamudin (memerintah 1758 – 1776 Masehi). Sultan Najamudin menikah dengan bangsawan Mentok bernama Yang Mariam, anak dari Abang Jafar (nanti memiliki keturunan bernama Raden Ja'far).

Bagan 7
Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang di Bangka
(Masa Kepemimpinan Menteri Rangga Usman,
± 1746 – 1758 Masehi)



Sultan Mahmud Badarudin I wafat pada 1758 Masehi dan digantikan oleh Sultan Ahmad Najamudin (memerintah 1758 – 1776 Masehi). Sultan Najamudin menikah dengan bangsawan Mentok bernama Yang Mariam, anak dari Abang Jafar (nanti memiliki keturunan bernama Raden Ja'far).

Fasal kedua puluh tujuh mengisahkan di Mentok, Menteri Rangga Usman sudah lanjut usia dan tidak dapat lagi menjalankan tugasnya (beliau wafat pada usia 96 tahun) sehingga Sultan Najamuddin mengangkat Abang Pahang (kakek Yang Mariam, istri Sultan Najamuddin) sebagai kepala pemerintahan untuk seluruh Pulau Bangka menggantikan kedudukan Menteri Rangga Usman dengan gelar Temenggung Dita Menggala (gelar temenggung pertama di tanah Bangka yang setara dengan kedudukan temenggung di Palembang).

Pada masa pemerintahan Abang Pahang di Bangka terjadi beberapa perubahan pesat. Parit timah baru banyak dibuka, sehingga produksi timah Bangka meningkat. Di sisi pemerintahan, pangkat Patih yang sebelumnya dipergunakan diganti dengan pangkat Depati (setara dengan jabatan Depati Ulu di Palembang lebih kecil dari pangkat demang). Sementara di bawah jabatan Depati ditambah pangkat Keria dan Ngabehi, Batin Pesirah dan Batin Pengandang mengikuti seperti Proatin di Palembang. Pada era ini, kekuasaan Temenggung di Mentok tidak hanya Pulau Bangka saja tetapi juga melingkupi wilayah Pulau Belitung. Susunan jabatan berdasarkan daerah sebagai berikut.

Tabel 5
Depati dan bawahannya di Bangka
era kepemimpinan Abang Pahang

NO.	DAERAH	KEPALA	
1.	Dipak	Depati, dibantu	6 Batin Pengandang
2.	Paku	Depati, dibantu	6 Batin Pengandang, 2 keria (sama derajat dengan Batin)
3.	Panji	Pesirah, dibantu	3 Batin Pengandang
4.	Mentok	Pesirah, dibantu	5 Pengandang
5	Belitung	Depati, dibantu	5 Ngabehi dan 1 keria
Catatan: Semua kepala berada di bawah Temenggung di Mentok.			

Temenggung dibantu oleh seorang penghulu dan imam untuk urusan agama Islam. Sultan juga memerintahkan Demang dan Jenang yang bertugas mengurus timah tiban dan mengawasi parit-parit timah di seluruh Pulau Bangka, dan memerintahkan Temenggung di Bangka untuk mencarikan tempat untuk dibangun kota atau negeri tempat kedudukan Demang dan Jenang tersebut.

Di sebelah timur Mentok dibangun pangkal di Pait, Belo, dan Tempilang. Di sebelah barat Mentok dibangun pangkal Biat, Bunut, Bendul, Rambat, dan Sungaibuluh. Batin Pesirah Panji membuat Pangkal Panji, Depati Dipak membuat pangkal di Layang, Sungailiat, Cengal, dan Pangkalpinang. Depati Pakuk membuat pangkal di Koba, Balar, Toboali Lama. Sedangkan pangkal yang telah ada sebelumnya seperti Ulim, Bangkakota, Djeruk dan Kotawaringin tetap berdiri sebagaimana biasa.

Fase ini adalah fase puncak, zaman keemasan produksi timah yang melimpah di era Kesultanan Palembang atas Bangka. Masa keemasan ini tetapi memiliki harga yang mahal. Permasalahan muncul, membutuhkan pola manajemen dan keputusan yang tepat.

Peningkatan produksi timah lagi-lagi memicu perampokan timah oleh bajak laut yang berkeliaran di perairan Pulau Bangka dan Belitung. Pun perilaku pengawasan Demang dan Jenang tidak berjalan efektif, cenderung tidak jujur dan berlaku korup menambah permasalahan yang dihadapi pada masa ini.

Dari sisi pekerja tambang timah yang didominasi oleh kelompok Cina muncul desakan pula kepada Temenggung di Mentok untuk mengembalikan Bun A Sing (yang dihukum buang oleh Sultan Palembang karena bertindak korup) sebagai pimpinan parit timah.

Perampokan timah oleh lanun di parit-parit/ tambang semakin sering terjadi dan Temenggung Dita Menggala juga mendengar informasi penyerangan dari seorang raja dari Tanah Johor yang akan menyerang Palembang dengan terlebih dahulu menguasai Bangka.

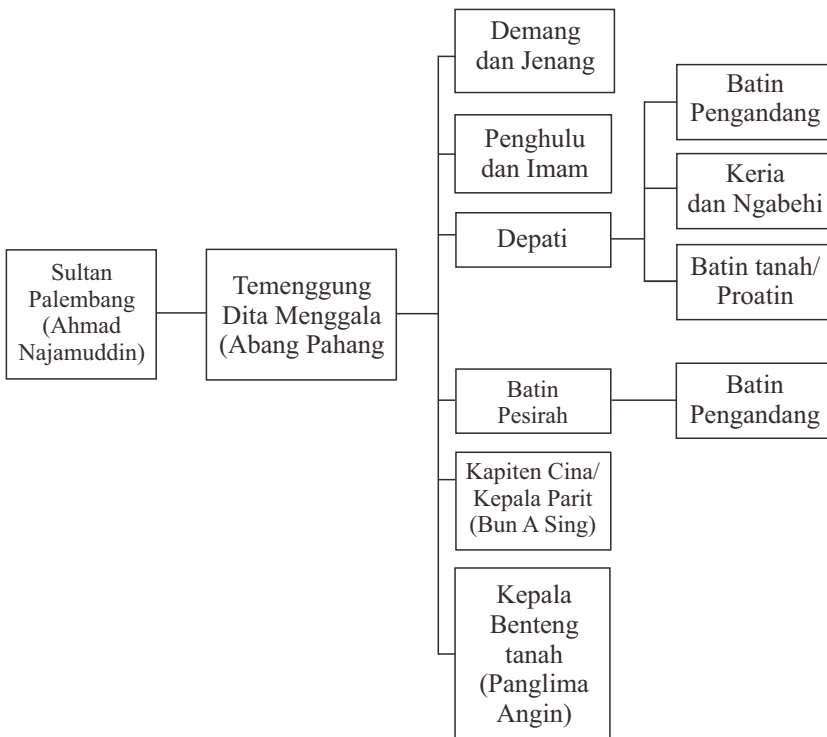
Temenggung Dita Menggala menghadap ke Palembang mengusulkan tiga hal kepada Sultan. Mengembalikan Bun A Sing, memperkuat benteng pertahanan di Mentok, dan bantuan pengamanan pasukan Palembang di perairan Bangka. Sultan setuju. Bun A Sing yang diasingkan di Muara Beliti diampuni Sultan, kembali sebagai kepala Cina di Mentok yang berada di bawah Temenggung (setelah bekerja dengan baik, Bun A Sing diangkat sebagai Kapten Cina). Benteng tua di era Wan Akub diperbaiki dengan bantuan uang seribu ringgit dan seribu pikul beras dari Sultan Palembang (dikenal dengan sebutan benteng Kute Seribu), dan bantuan pengamanan di perairan Bangka oleh Sultan Palembang.

Setelah itu Temenggung Dita Menggala juga meminta izin kepada Sultan untuk membangun benteng pertahanan dari tanah (kute) di setiap parit timah/ pangkal yang memiliki gudang penyimpanan timah di Bangka untuk pengamanan dari perampokan bajak laut.

Maka berdirilah Kute Belinyu dan Tempilang serta diangkat seorang pendekar sebagai kepala penjaga dengan gelar Panglima Angin (salah satu yang terkenal berani dan tangkas oleh rakyat Bangka dan menjadi cerita komunal adalah Cek Daud Panglima Angin).

Di Biat, Bunut, Bendul, Sungkal, Rambat juga dibangun kute, lalu baru membangun gedung beserta kute di Panji dan seorang kepala orang Cina di Panji bernama I Koh membangun gedung dan kute di Klabat.

Bagan 8
Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang di Bangka
(Kepemimpinan Temenggung Dita Menggala, ± 1758 – 1790an Masehi)



Era kepemimpinan Temenggung Abang Pahang adalah era Bangka di bawah kekuasaan Palembang dengan tata pemerintahan, wilayah kekuasaan, dan pembangunan infrastruktur yang paling masif terjadi.

Hal ini berbarengan dengan meningkatnya produksi timah Bangka yang tinggi dan memberikan keuntungan besar bagi Kesultanan Palembang.

Tahun 1776 Masehi, Sultan Najamuddin wafat dan digantikan oleh Sultan Bahaudin (memerintah 1776-1803 Masehi). Sultan Bahaudin juga menikah dengan bangsawan dari Mentok bernama Yang Pipah (anak dari Abang Ismail atau cucu dari Abang Pahang, Temenggung Dita Menggala).

Dikisahkan pada fasal kedua puluh delapan, tak berselang lama, Temenggung di Mentok, Abang Pahang wafat dan dimakamkan di pekuburan Kute Seribu dengan upacara kebesaran. Sultan Palembang mengirimkan batu nisan yang terbuat dari batu karang berukir indah sebagai tanda jasa beliau.

Foto 5
Makam Temenggung Dita Menggala di Mentok-Kute Seribu



(Sumber: Dokumentasi Cagar Budaya dan Situs Bangka Belitung)



Nisan kepala menghadap utara.
Tertulis: *“Datuk alamat
Temenggung Dita Menggala”*



Nisan kaki menghadap selatan
Tertulis: *“wafat pada 12 hari
bulan Safar malam Ahad 1202”*

Kemudian diangkatlah anak Temenggung Dita Menggala bernama Abang Ismail (mertua Sultan Bahaudin) untuk menggantikan kedudukan ayahnya dengan bergelar Temenggung Kerta Menggala. Temenggung Kerta Menggala memiliki istri bernama Tuk Syarifah yang dianggap sering mencampuri urusan pemerintahan negeri.

Kekuasaan Temenggung di Mentok yang sama besar dengan kekuasaan Temenggung sebelumnya, dikarenakan ketidakhandalan Temenggung dan campur tangan istrinya menjadi tidak berjalan dengan efektif dan mengakibatkan kerusuhan/ketidakebecusan.

Kejayaan timah Bangka pada masa kepemimpinan Temenggung Abang Pahang mengundang meningkatnya gangguan dari bajak laut yang meneror perairan Bangka.

Dicatatkan seorang Depati bernama Anggur berlaku korup menjual timah kepada bajak laut yang datang. Hal ini diketahui oleh Jenang lalu Palembang mengirimkan Kemas Ismail untuk menangkap Depati Anggur. Depati Anggur terluka, lalu bersama istri dan anaknya yang masih kecil bernama Bahrin lari/ dibawa ikut oleh lanun. Namun Depati Anggur meninggal akibat lukanya di negeri lanun. Tak lama kemudian serangan lanun datang kembali, menguasai daerah Pulau Lepar dan Belitung, merampas dan menyerang parit timah di wilayah Toboali dan Koba.

Untuk memulihkan keadaan, Sultan Bahaudin memerintahkan dan menunjuk anaknya; Pangeran Adiwijaya sebagai kepala pemerintahan untuk memegang kekuasaan wilayah sekitar Toboali, Pulau Lepar Pongok, dan Pulau Belitung dengan berkedudukan di Toboali. Kemudian beberapa pangkal di Pulau Bangka dipimpin oleh seorang menteri dari Palembang yang menjalankan segala perkara terkait dengan penambangan timah (sedangkan Temenggung Kerta Menggala dibatasi hanya berkuasa dari wilayah Sungai Kampak sampai dengan sekitar Tempilang dan berkedudukan di Mentok).

Kepentingan Palembang atas Bangka yang besar (komoditi timahnya) membuat Sultan terus melakukan perbaikan atas kondisi Bangka. Di setiap pangkal diperkuat dengan benteng tanah atau benteng kayu, di Klabat dibuatkan gedung (gudang). Sultan juga mendatangkan lagi orang dari Johor, Lingga, Riau dan Cina ke Pulau Bangka untuk mengerjakan parit yang terbengkalai serta membuka parit baru. Perubahan pola manajemen pada penambangan terjadi di kelompok Cina.

Di masa ini Sultan mengizinkan Kapiten Cina yang membentuk kongsi di Bangka mengeluarkan uang pitis timah di masing-masing kongsi. Pitis yang hanya berlaku di tiap kongsinya, lalu dapat ditukar dengan uang tembaga atau uang perak jika hendak dibawa keluar kongsinya. Namun kondisi Bangka masih carut marut. Pembunuhan, korupsi timah, dan kejahatan lainnya kerap terjadi. Perilaku pejabat Palembang di Bangka (Demang dan Jenang) juga banyak melakukan penipuan timah dan marak melakukan perjudian.

Hal ini mengakibatkan ketidaksukaan banyak pihak dan perselisihan dukungan dalam keluarga bangsawan di Mentok terhadap kepemimpinan Temenggung Abang Ismail. Lalu ini memuncak menjadi perseteruan antara Temenggung dengan Abang Tawi dan Abang Kumbang, berakhir tragis dengan kematian Abang Tawi yang dihukum Sultan Palembang akibat fitnah Temenggung Kerta Menggala. Dampak dari perseteruan ini mengakibatkan perpindahan keluarga besar Abang Tawi dari Mentok ke Lingga (diterima oleh Sultan Lingga dan diberi tempat untuk tinggal di Pulau Singkep), ketidakpercayaan rakyat atas kepemimpinan Temenggung, dan berujung kepada produktivitas tambang timah yang menurun.

Adalah Abang Rauf, putra dari Abang Tawi yang masih menaruh dendam kepada Sultan Palembang, menghadap Sultan Lingga dan membujuk Sultan untuk menguasai Pulau Bangka yang memiliki timah melimpah. Lalu berangkatlah armada pasukan laut Lingga dengan persenjataan lengkap yang dipimpin oleh Panglima Rahman menyerang Bangka.

Masuk lewat Belinyu, pasukan Lingga merampas timah, mengakibatkan rusaknya kampung sehingga penduduk lari bersembunyi ke hutan, tidak bisa berladang, berdampak kepada kelaparan. Di tengah prahara itu terjadi juga serangan penyakit cacar yang semakin menambah penderitaan.

Sultan Palembang mendengar berita itu dan mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Kemas Ismail, Ngabehi Hasan, Ngabehi Abdullah, Raden Jakfar berhasil mengusir pasukan Panglima Rahman kembali ke Lingga. Sebagian penduduk yang menjadi tawanan dan sakit dibawa ke Mentok ditempatkan di sekitar kaki Menumbing (asal usul orang Kemang Masam dan sekitarnya). Serangan Lingga ini berdampak buruk bagi Bangka.

Tjarita Bangka menuliskan populasi di Bangka menurun drastis. Selain ditangkap lalu dijual ke luar Bangka, jumlah orang Bangka yang mati akibat penyakit, dan kelaparan hanya menyisakan sepertiga dari jumlah penduduk Bangka sebelumnya.

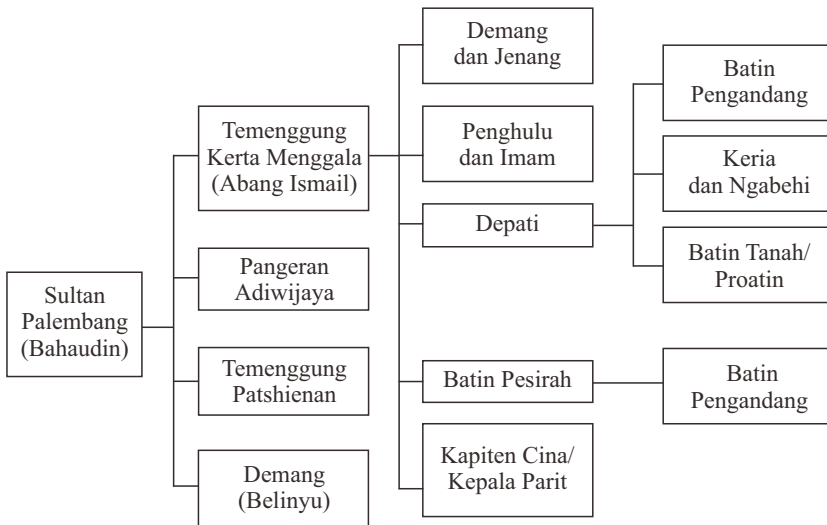
Untuk kedua kalinya pada 1789 Masehi, Sultan Lingga kembali mengirimkan pasukannya menyerang Bangka. dengan persenjataan yang lebih lengkap dan dibantu dengan pasukan keturunan Bugis. Pasukan Lingga kali ini dibagi dalam dua pasukan. Satu pasukan dipimpin oleh Panglima Rahman, satu lagi dipimpin oleh keturunan Bugis bernama Arung Marupu. Dalam perjalanan ke Bangka pasukan Lingga dihantam badai. Pasukan terpisah.

Panglima Rahman terbawa arus ke bagian utara Pulau Bangka, membuat kekacauan di sekitar Tanjung Tuing lalu kembali ke Lingga, sementara pasukan Arung Marupu ke sebelah barat Pulau Bangka (laut Mentok), mendapat perlawanan dahsyat dari pasukan Mentok yang dipimpin oleh Demang Minyak, Abang Yunus, Bilal Muhammad, serta Raden Jakfar. Pasukan Arung Marupu kalah dan berlayar kembali ke Lingga.

Masa Bangka di era Temenggung Kerta Menggala mengalami banyak kemunduran dalam hal kesejahteraan, keamanan dan ketertiban masyarakat dibandingkan dengan masa sebelumnya. Masa ini adalah periode bencana. Kondisi ini tergambar dalam pola pemerintahan negeri di mana kekuasaan Temenggung tidak *powerfull* seperti di era Abang Pahang, ditunjuknya pejabat lain dari Palembang untuk mengatasi masalah, dan ketergantungan urusan hulubalang/ pasukan tempur Palembang untuk memberikan pengamanan atas Bangka.

Di era ini, Pulau Bangka dibagi ke dalam empat wilayah administrasi. Temenggung di Mentok hanya memiliki kekuasaan wilayah yang terbentang antara Sungai Kampak hingga Tempilang. Wilayah selatan dari Tempilang yaitu Lepar, dan Belitung dipimpin oleh Pangeran Adiwijaya yang berkedudukan di Toboali, serta bagian utara dan timur masing-masing dikuasai oleh pejabat dari Palembang yang memerintah di tiap pangkal. Merujuk kepada tulisan Horsfield, di daerah Pangkal Pangkalpinang dan sekitarnya dipimpin oleh Temenggung Pastshienan. Sementara wilayah Belinyu dan sekitarnya dipimpin oleh seorang Demang Sadjo Truno.

Bagan 9
Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang di Bangka
(Kepemimpinan Temenggung Kerta Menggala,
± 1790 – 1806 Masehi)

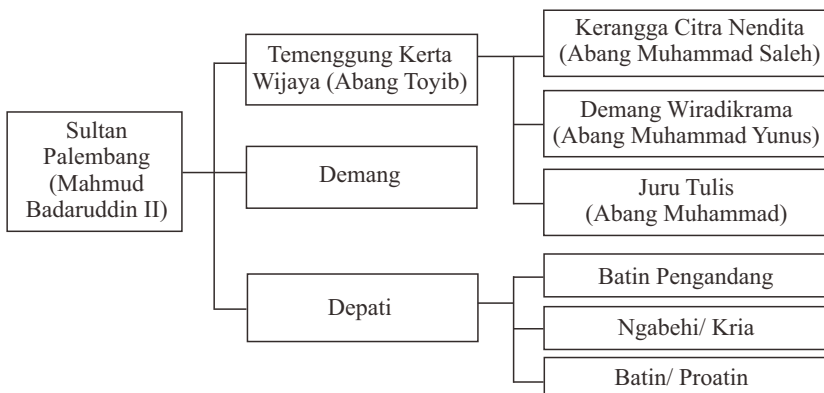


Fasal kedua puluh sembilan mengisahkan Sultan Bahaudin wafat dan digantikan oleh anaknya Raden Hasan yang bergelar Susuhunan Mahmud Badaruddin II/ SMB II (memerintah 1803-1821 Masehi) yang meminang Yang Masyiroh (cucu Abang Ismail). Di Bangka, tak lama setelah SMB II menjadi Sultan Palembang, Temenggung Kerta Menggala wafat dan digantikan dengan putranya yang bernama Abang Muhammad Toyib untuk memegang kekuasaan di Mentok dengan gelar Temenggung Kerta Wijaya.

Di bawah jabatan Temenggung, Sultan mengangkat pula Abang Muhammd Saleh sebagai Kerangga dengan gelar Kerangga Citra Nendita, di samping itu juga mengangkat pula Abang Muhammad Yunus sebagai Demang dengan gelar Demang Wira Dikerama dan mengangkat seorang juru tulis bernama Abang Muhammad. Era ini adalah babak akhir dari masa Pulau Bangka di bawah kekuasaan Kesultanan Palembang.

Masa pemerintahan Abang Toyib diduga memiliki wilayah kekuasaan yang sama seperti Temenggung sebelumnya di mana Temenggung di Mentok hanya berkuasa di antara Sungai Kampak (Jebus) hingga Tempilang. Jabatan Depati dan Demang (dan bawahannya), diperkirakan mengikuti pola di masa Temenggung Abang Ismail, di mana jabatan itu ditunjuk oleh Sultan Palembang untuk berkuasa di daerah di luar kuasa Temenggung Mentok.

Bagan 10
Struktur Pemerintahan Kesultanan Palembang di Bangka
(Masa Kepemimpinan Temenggung Kerta Wijaya,
± 1806 – 1812 Masehi)



Pada tahun 1811 Masehi terjadi pengusiran besar-besaran orang Belanda di Palembang. Belanda menyerah terhadap Inggris pada 18 September 1811 Masehi, dan mulailah masa invasi Inggris atas Palembang.

Inggris memenangkan perang atas Palembang. Penguasaan atas Pulau Bangka beralih dari Kesultanan Palembang kepada Inggris untuk kemudian beralih ke Belanda pada 1816 Masehi. Pada 1819 dimulai peperangan antara Kesultanan Palembang dan Belanda berlanjut hingga masa Sultan berikutnya. Serangan Belanda pada Juni 1821 Masehi berhasil melumpuhkan Palembang dan akhirnya pada 1823 Masehi Kesultanan Palembang resmi dihapuskan oleh Belanda.

C.3. Pergeseran Pusat Pemerintahan dan Perkembangan Aturan/Hukum yang Mengatur Pulau Bangka

Selain mempengaruhi tata pemerintahan, dominasi kekuasaan besar atas Bangka juga memberikan pengaruh pada bergesernya pusat pemerintahan dan perkembangan aturan (hukum) yang berlaku.

a) Pergeseran Pusat Pemerintahan di Pulau Bangka

Beberapa nama tempat di Bangka sempat populer sebagai pusat pemerintahan atas Bangka. Kecenderungannya, tempat tersebut dipilih sebagai pusat bagi aktivitas atas berbagai pertimbangan antara lain; letaknya yang strategis, terlindungi dari ancaman bencana dan serangan musuh. Beberapa daerah yang pernah menjadi pusat pemerintahan di Bangka antara lain adalah:

Pada tahun 1811 Masehi terjadi pengusiran besar-besaran orang Belanda di Palembang. Belanda menyerah terhadap Inggris pada 18 September 1811 Masehi, dan mulailah masa invasi Inggris atas Palembang.

1) Kota Kapur

Kota Kapur tercatat sebagai pusat peradaban tertua di Tanah Bangka. Kota Kapur terletak di muara Sungai Menduk. Deteksi kepurbakalaan Kota Kapur memang populer atas penemuan sebuah prasasti yang dikenal dengan nama Prasasti Kota Kapur bertanggal 686 Masehi, merujuk kepada periode dominasi Sriwijaya atas wilayah Bangka. Selanjutnya, Kota Kapur masih menjadi tempat yang penting pada masa Pulau Bangka berada dalam pengaruh kekuasaan Madjapahit dan Johor-Minangkabau.

Di masa Bangka dalam pengaruh Kerajaan Madjapahit, ekspedisi pertama yang dipimpin oleh Gajahmada mendarat pertama kali di kaki Gunung Menumbing, lalu menamai sebuah daerah bernama “Punggur”. Berikutnya beberapa nama yang tercatat di era ini adalah Panji, Maras, dan Djeruk.

Utusan kedua dari Madjapahit ke Bangka adalah Pangeran Temenggung Dinata yang meninjau kembali Pulau Bangka setelah lama ditinggalkan untuk menata pemerintahan dan meneliti potensi sumber daya alam, untuk selanjutnya kembali ke Madjapahit dan menyerahkan wewenang kepada Patih Tali di Mendo dan Patih Panjang Jiwa di Djeruk.

Setelah itu, Bangka sepenuhnya diatur oleh orang di Pulau Bangka sendiri, terbagi ke dalam lima kepatihan, salah satunya adalah Patih Singa Panjang Jongor yang berasal dari Bugis yang membangun komunitas sendiri di Kota Kapur, di muara Sungai Mendo'.

Di masa berikutnya, Kota Kapur berhasil dikuasai oleh Raja Alam Harimau Garang, seorang hulubalang dari Kerajaan Minangkabau yang dikirim bersama Tuan Sarah dari Johor ke Bangka untuk menumpas Suku Melukut yang menyerang Bangka (Patih Singa Panjang Jongor di Kota Kapur rupanya terbukti bersekongkol dengan Raja Tidung dari Suku Melukut).

2) Kotawaringin

Di era Kesultanan Johor-Minangkabau atas Bangka sekitar abad ke-16 Masehi, Tuan Sarah dan Raja Alam Harimau Garang menghimpun pasukan untuk menumpas pasukan Raja Tidung, di suatu lapangan luas di tepi sungai yang ditandai dengan sebuah pohon beringin besar. Tempat ini menjadi pangkalan yang dinamai Kota Beringin atau Kotawaringin.

Setelah Raja Tidung dan pasukannya berhasil ditumpas dan keadaan menjadi aman, Alam Harimau Garang dan Tuan Sarah melakukan pengaturan masyarakat di Bangka. Tuan Sarah menjadi raja muda di Bangka Kota sedangkan Harimau Garang memimpin di Kotawaringin.

Secara umum, Pulau Bangka berada di bawah kepemimpinan Sultan Johor, sehingga tata tertib bermasyarakat mengadopsi ajaran Islam. Beberapa ketetapan umum dikeluarkan antara lain sebutan Batin sebagai kepala di bawah Patih (sebutan Batin ini lazim digunakan oleh orang Lingga, karena banyak pendayung kapal pasukan yang berasal dari Lingga. Dalam catatan, hanya separuh pasukan yang ikut berperang di Bangka kembali ke Johor. Sedangkan separuhnya lagi menetap di Bangka).

Sepeningalan Tuan Sarah, Sultan Johor tidak berminat mengangkat penggantinya sebagai penguasa Johor di Bangka. Kekuasaan atas Bangka diserahkan kepada Raja Alam Harimau Garang. Pulau Bangka kemudian berada di bawah kekuasaan Minangkabau, berkedudukan di Kotawaringin.

Posisi Kotawaringin cukup strategis karena berada di tepi sungai yang bermuara ke Selat Bangka di mana transportasi pada saat itu didominasi oleh perahu dan kapal layar sehingga mampu menjangkau wilayah pantai timur Sumatera dan wilayah pedalaman di Bangka.

Setelah Harimau Garang wafat dan dimakamkan di Kotawaringin (makamnya dikeramatkan dengan sebutan Keramat Garang), pemerintahan diteruskan oleh Patih Raksa Kuning dibantu oleh Hulubalang Selangor. Setelah mereka berdua wafat, Sultan Minangkabau juga tidak berminat mengangkat penggantinya.

Pimpinan daerah dipegang oleh masing-masing Batin. Hal ini mengakibatkan situasi menjadi tidak teratur, diserang oleh bajak laut, sehingga Kotawaringin ditinggalkan oleh sebagian penduduknya.

3) Bangkakota

Sama dengan Kotawaringin, Bangkakota dibangun pada masa kekuatan Kesultanan Johor-Minangkabau datang ke Bangka. Alam Harimau Garang yang memasuki Bangka melalui Sungai Djeruk, lalu menemukan Patih Raksa Kuning dan Hulubalang Selangor beserta pengikutnya yang bersembunyi di dalam hutan. Mereka segera menghimpun seluruh orang Bangka di satu daerah di selatan Bangka yang dinamai Bangkakota.

Di masa keadaan sudah tenang, Bangkakota menjadi pusat pemerintahan yang dipegang oleh Tuan Sarah sebagai perwakilan Kesultanan Johor di Bangka. Tuan Sarah memerintahkan membangun satu “Koeboe atau Kota” sebagai bagian dari strategi pertahanan.

Dari Bangkakota kemudian Tuan Sarah melakukan pengaturan masyarakat dan menyebarkan ajaran Islam. Tuan Sarah memimpin Bangka dengan sukses, membawa keamanan dan kemakmuran hingga ia wafat dan dimakamkan di Bangkakota yang dikenal sebagai makam Keramat Tuan Sarah. Setelah wafatnya Tuan Sarah dan berakhirnya hegemoni kekuasaan Johor-Minangkabau atas Pulau Bangka, Bangkakota menjadi wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Banten.

Dari Bangkakota kemudian Tuan Sarah melakukan pengaturan masyarakat dan menyebarkan ajaran Islam. Tuan Sarah memimpin Bangka dengan sukses, membawa keamanan dan kemakmuran hingga ia wafat dan dimakamkan di Bangkakota yang dikenal sebagai makam Keramat Tuan Sarah. Setelah wafatnya Tuan Sarah dan berakhirnya hegemoni kekuasaan Johor-Minangkabau atas Pulau Bangka, Bangkakota menjadi wilayah yang dikuasai oleh Kesultanan Banten.

Banten menganggap penting posisi Pulau Bangka karena letaknya yang strategis bagi jalur perdagangan lada yang berhadapan langsung dengan Kesultanan Palembang yang pada saat itu juga menguasai alur perdagangan di wilayah barat Nusantara. Perebutan hegemoni alur perdagangan ini kemudian memicu terjadinya perang antara Banten dan Palembang. Pada suatu peperangan antara Banten dan Palembang, seorang putra Sultan Banten bernama Ratu Bagus melarikan diri ke Pulau Nangka kemudian pindah dan menetap di Bangka, wafat dan dimakamkan di Bangkakota (makam Ratu Bagus ini dikenal dengan sebutan Keramat Ratu Bagus atau Keramat Jatisari).

Pengaruh Kesultanan Banten yang sangat besar di Nusantara termasuk Bangka terjadi pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa (1651-1684 Masehi) di mana pusat kekuasaannya di Bangka berada di Bangkakota yang dipimpin oleh seorang raja muda bernama Bupati Nusantara.

Pada 1671 Masehi, Bupati Nusantara wafat dan kekuasaan atas Bangka dilimpahkan kepada putrinya; Ratu Agung, yang telah menjadi istri Sultan Abdurrahman dari Kesultanan Palembang Darussalam sehingga secara tidak langsung Pulau Bangka berada dalam penguasaan Kesultanan Palembang.

4) Mentok

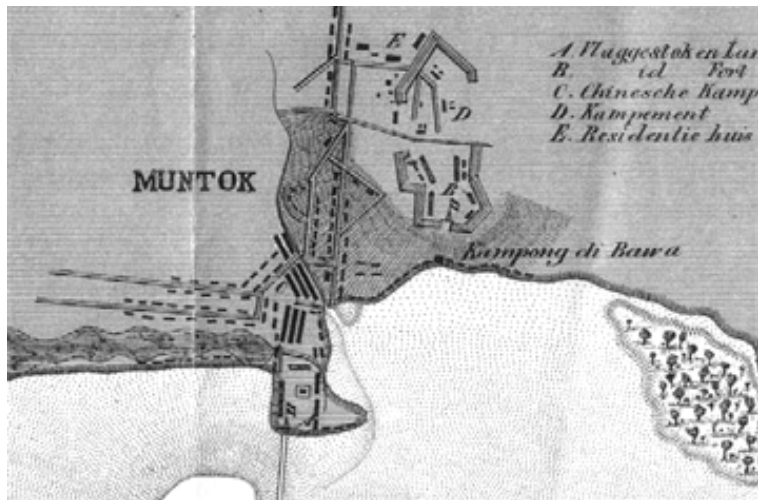
Mentok didirikan pada 1734 Masehi⁹, setelah tujuh bubung rumah yang dikerjakan oleh Proatin Sukal dan Punggur selesai dibangun dan kedatangan keluarga Siantan dari Kepulauan Anambas, atas perintah Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama untuk menetap di Mentok. Mentok yang awalnya adalah hadiah bagi bangsawan Siantan atas jasanya terhadap Sultan, kemudian berkembang menjadi sebuah kota pelabuhan, tempat bertemunya banyak bangsa, kota budaya yang aktif.

Era kejayaan Mentok sebagai pusat pemerintahan bahkan terus berlanjut setelah dominasi kekuasaan Kesultanan Palembang. Mentok juga menjadu pusat pemerintahan di era Inggris (1812-1816 Masehi), kemudian diteruskan oleh Belanda. Pada 1913 Masehi, dilakukan pemisahan antara kewenangan pemerintahan dan pengelolaan tambang timah Bangka karena pengaruh semangat politik di Negeri Belanda.

⁹ Merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Hari Jadi Kota Mentok. Pada Pasal 2 ditetapkan hari jadi Kota Muntok pada 7 September 1734 M sebagai momentum berdirinya daerah yang dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Pusat pemerintahan atas Bangka dialihkan ke Pangkalpinang sementara Mentok tetap menjadi pusat penambangan timah atas seluruh Pulau Bangka. Hal ini kemudian ditandai dengan berdirinya bangunan Kantor Pusat Perusahaan Tambang Timah Bangka ”*Hof de berau Banka Tin Winning*” di tengah kota Mentok pada 1915 Masehi.

Gambar 4
Peta kota Mentok, ± tahun 1859



Sumber: The-Map-of-Muntok-in-SourceKoninklijk-Instituut-voor-de-Taal-Land-en-Volkenkunde

b) Perkembangan Hukum di Pulau Bangka

1) Aturan Campuran Jawa, Bugis, dan Melayu

Terkait hal ini terdapat dalam Manuskrip *Tjarita Bangka* ketika mengisahkan Bangka di bawah kekuasaan Kesultanan Banten.

Utusan dari Banten; Panembahan Serpu, menetapkan kembali adat istiadat orang Bangka yang telah bercampur dengan adat Bugis, Jawa, dan Melayu, menentukan batas tanah satu patih dengan lainnya dan batas proatin yang ada di bawah patih, serta memperbaiki aturan pemerintahan negeri. Sama dengan aturan di periode Johor – Minangkabau, aturan bahwa orang Melayu bebas daripada pekerjaan negeri melainkan jika terjadi peperangan mereka wajib menjadi serdadu laut dan darat; tetap berlaku.

Aturan campuran ini dimungkinkan terjadi akibat dari periode penguasaan atas Pulau Bangka di masa sebelumnya (era Madjapahit, Johor-Minangkabau) di mana Bangka sudah mengadopsi aturan-aturan yang berlaku di Jawa (Madjapahit), orang Bugis dan Melayu (Johor-Minangkabau). Keterlibatan orang Bugis dan aturannya di Bangka diduga diterapkan oleh prajurit angkatan laut yang dibawa oleh Tuan Sarah ketika datang ke Bangka untuk menumpas Raja Tidung dari Melukut. Kebiasaan prajurit angkatan laut Johor (yang diduga berasal dari suku Bugis) ini kemudian berkembang menjadi kebiasaan orang perahu yang berada di pesisir laut Pulau Bangka atau yang dikenal dengan orang laut.

2) Timah Tiban

Di masa awal Mentok sebagai pusat pemerintahan atas Bangka di bawah Kesultanan Palembang, Wan Akub yang diangkat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan dan Urusan Penambangan Timah di Pulau Bangka.

Saat itu Wan Akub mulai memperluas parit-parit timah dengan menggunakan orang Johor yang ahli dalam penambangan timah sehingga mendatangkan keuntungan bagi Kesultanan Palembang.

Hal ini menggembarakan Sultan sehingga mengirimkan seorang temenggung dari Palembang ke Mentok dan selanjutnya bersama Wan Akub dan patih-patih menetapkan sebuah aturan yang dikenal dengan Timah Tiban, yaitu ketentuan bagi setiap laki-laki yang sudah kawin menyerahkan jongsong timah yang setara dengan 50 kati setiap tahunnya kepada Wan Akub untuk selanjutnya diserahkan kepada Sultan Palembang.

Sebagai imbalannya, Sultan akan memberikan tiap orang itu sepotong kain cuken dan sepotong kain hitam. Peraturan berlaku untuk seluruh orang Bangka tetapi tidak berlaku bagi orang Melayu yang berasal dari tanah Johor dan Siantan.

Ketentuan tentang Timah Tiban ini ternyata dirasakan memberatkan orang Bangka. Hal ini didasarkan kepada fakta bahwa orang Bangka tidak pernah dikenakan beban seperti itu dan tidak memiliki pengetahuan atau keahlian menambang timah seperti orang Johor. Akibatnya hasil yang dipersembahkan oleh Wan Akub kepada Sultan tidak memuaskan.

Setelah itu muncullah persetujuan Sultan atas usul Wan Akub untuk mencari tenaga kerja yang handal dalam menambang timah dan diutuslah Wan Serin mencari orang Cina, Siam, Kamboja, dan Siantan yang berada di Johor untuk menambang timah di Bangka. Awal dari pola mendatangkan tenaga kerja dari luar Bangka untuk ditempatkan di parit tambang.

3) Sindang Mardika

Sindang Mardika adalah sebutan untuk seperangkat aturan yang berlaku untuk daerah luar Kesultanan Palembang, di mana Pulau Bangka termasuk daerah luar yang berbatasan dengan kekuasaan lainnya.

Di masa pengangkatan Ence' Wan Usman (Tuk Aji) sebagai pemimpin di Mentok atas seluruh Tanah Bangka dengan gelar Menteri Rangga, di hadapan para pejabat Kesultanan Palembang dan para batin/ pemimpin dari Bangka, Sultan menetapkan batas kekuasaan yang akan dipegang Menteri Rangga Usman berupa 10 fasal. Selain ketetapan sebagai kewenangan Menteri Rangga, juga ditetapkan 45 fasal yang menjadi ketetapan bagi kehidupan bermasyarakat orang di Bangka. Ketetapan itu merupakan paduan dari aturan adat yang sudah ada sebelumnya di mana 45 fasal tersebut telah diubah dan disesuaikan oleh Kesultanan Palembang. Hingga saat ini, beberapa penerapan aturan adat (Sindang Mardika) tersebut masih dapat ditemukan, bertahan dan dilestarikan hingga saat ini meski dalam sebutan dan pemahaman yang tidak lagi sama dengan yang dahulu.

4) Kelompok Elit

Di era Bangka dalam pengaruh kekuasaan Kesultanan Palembang, penetapan gelar Abang dan Yang sebagai kelompok bangsawan yang dikukuhkan Sultan sebagai pembeda dengan gelar sebelumnya di Anambas (Kesultanan) Johor, dan memimpin Bangka.

Pernikahan politik antara Sultan Palembang dan bangsawan Mentok juga membangun pola kekerabatan dan hubungan/ hegemoni Palembang-Bangka yang kuat. Setelah masa Wan Akub dan Rangga Usman, jabatan Temenggung dipegang oleh kelompok bangsawan Mentok secara turun temurun (Abang Pahang - Abang Ismail - Abang Toyib).

Selain jabatan pemimpin negeri, jabatan Demang dan Jenang (ditugaskan untuk mengawasi tambang timah Bangka) juga adalah wakil Sultan yang memiliki hubungan kekerabatan. Beberapa kasus, menunjukkan peran kerabat Sultan Palembang yang memiliki kekuasaan di luar struktur namun tetap dihormati dan berpengaruh selama di Bangka seperti Raden Djakfar (anak Sultan dari istri seorang bangsawan Mentok).

Di era Kesultanan Palembang menguasai Bangka menjadi kali pertama kelompok Cina dan orang Asia Tenggara (penambang) mulai masif mendiami Bangka. Memulai pola pembentukan komunitas penambang (kongsi) yang terus berakar hingga era kolonial Belanda.

Dalam *Tjarita Bangka*, kisah seorang Bun A Sing, terbukti bersalah dan dihukum oleh Sultan namun dengan kedekatannya dengan pejabat kesultanan mampu menganulir hukuman mati ke hukum buang. Selanjutnya bahkan diampuni dan diangkat kembali menjadi Kapiten Cina di Bangka.

Di era berikutnya dalam buku Steve Haryono, *Perkawinan Strategis*, kelompok elit peranakan Tionghoa di Bangka menjaga kedudukan dan karir mereka agar dapat diregenerasikan dengan melakukan perkawinan strategis dengan sesama opsir/ pejabat/ orang terkemuka. Beberapa marga dominan dalam struktur pemerintahan di era Kolonial Belanda seperti marga Tjung, Lim, Tan, dan Bong adalah marga peranakan Tionghoa yang menjadi opsir Tionghoa di Bangka dengan jabatan Leutenant, Kapiten, bahkan Mayor Cina.

Mengutip Kemas Ridwan Kurniawan¹⁰ berikut adalah opsir peranakan Tionghoa di Mentok:

Tabel 5
Opsir Peranakan Tionghoa di Mentok

NAMA	PERIODE
Bong Hut But	< 1735
Boen A Siong	1735
Kapiten Cina Lim Tjassim	1814
Mayor Cina Tan Jin Men	1820an
Tan Hong Kwee	1831 – 1838

¹⁰ Kemas Ridwan Kurniawan, *The Hibrid Architecture of Colonial Tin Mining Town of Muntok*, Universitas Indonesia Press, 2013. Halaman 266-267.

Tan Kong Tian	1839
Kapiten Cina Tan Khe	1852
Kapiten Cina Lim Boesing	1858
Mayor Cina Tjeung A Thiam	1861
Mayor Cina Tjeung Fah Hieun	1896
Lieutenant Cina Lim A Pat	1913
Kapiten Cina Bong Khi Tjit	1925

D. Penutup

D.1. Kesimpulan

Manuskrip *Tjarita Bangka* dan literasi lainnya menguraikan sejarah Tanah Bangka sangat terpengaruh oleh kekuasaan besar dari luar pulau seperti kerajaan-kerajaan di Nusantara hingga bangsa lain seperti Inggris dan Belanda. Tidak ditemukan catatan sebuah kerajaan atau kekuasaan otonom yang merdeka dan mandiri mengatur Pulau Bangka serta terpisah dari kekuasaan besar lainnya. Semua pemerintahan di Pulau Bangka pada kurun waktu abad 14 hingga abad 19 Masehi adalah pemerintahan bawahan dari dominasi kekuasaan besar lainnya.

Masing-masing era dominasi kekuasaan atas Pulau Bangka ini memiliki karakter pemerintahan yang berbeda sehingga memberikan perubahan pada setiap era. Di era dominasi kekuasaan kerajaan di Nusantara, era Bangka di bawah Kesultanan Palembang Darussalam dipandang sebagai era yang paling banyak memberikan pengaruh dalam tata pemerintahan di Bangka.

Dalam era itu, pembagian pola kerja, distribusi pekerjaan, jabatan, gelar, pembakuan aturan/ hukum berubah-ubah mengikuti kondisi yang dibutuhkan.

D.2. Saran

Penting untuk mendokumentasikan jejak tata pemerintahan di Bangka pada masa-masa sebelum kemerdekaan untuk mengenali peninggalan masa lalu tersebut sebagai warisan. Beberapa hal dari peninggalan masa lalu itu, hari ini tinggal sebagai kekayaan *intangibile* dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bangka. Seperti sebutan depati, batin, dan beberapa gelar/ pangkat tata pemerintahan di masa lalu yang masih tinggal mengisi cerita tutur masyarakat atau menjadi sebuah toponim di beberapa daerah. Bahkan gelar kebangsawan “Abang dan Yang” di Mentok yang masih lestari dan dijaga secara turun temurun adalah bagian dari warisan orang Bangka yang luhur dan otentik.

Layaknya sebuah warisan, hanya pewaris yang mengenali dan menghargai warisan itulah yang mampu mendapat manfaat besar atas warisan. Betapa warisan sejarah dan budaya atas tata pemerintahan di masa lampau ini dapat memberikan banyak hal bagi generasi hari ini mengenali dan memahami jejak masa lalu itu.

Ada cerita tentang kejayaan, konflik, perseteruan, dan kebanggaan yang dapat menjadi pustaka bagi pembelajaran masa sekarang. Bagian dari upaya mengenali Bangka untuk dapat memahami, memperbaiki, dan membangun kejayaan Bangka dari sudut tertentu.

Semoga tulisan ini menjadi pemantik bagi generasi baru di Bangka untuk dapat menemukan kearifan masa lalu, menanamkan kebanggaan, mencintai Tanah Bangka sebagai harapan masa depan.

Lampiran

Gelar jabatan dalam tata pemerintahan di Pulau Bangka.

1) Patih

Gelar Patih mulai ada di masa Bangka dalam pengaruh kerajaan Majapahit pada sekitar abad ke-14 Masehi. Patih diasumsikan merupakan jabatan setingkat Gubernur pada kerajaan masa lalu (berbeda dengan Mahapatih yang setingkat dengan Perdana Menteri).

2) Hulubalang

Hulubalang adalah pejabat yang memegang urusan laskar/keprajuritan dalam tata pemerintahan.

3) Batin

Batin adalah Kepala Daerah di bawah Patih/ Depati. Beberapa Batin merupakan Kepala Kampung/ Dusun/ Desa.

4) Proatin

Proatin adalah bawahan Depati. Kata Proatin berasal dari kata *para batin*, kemudian berubah menjadi Proatin; Kepala Kecil atau Kepala Tingkat Rendahan¹¹.

¹¹ Dr. Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, hal 278

Wan Usman diangkat menjadi Menteri Rangga di Pulau Bangka bersama dengan penetapan batas kekuasaan yang dipegangnya serta ketetapan Sultan Palembang untuk aturan/ hukum adat yang berlaku untuk Bangka (aturan daerah/ sindang yang berbeda dengan aturan yang dipegang oleh Rangga di Tanah Palembang yang menggunakan aturan Simbur Cahaya).

9) Datuk Mata-Mata

Datuk Mata-Mata adalah gelar bagi Datuk Amat/ Wan Muhamad anak dari Wan Serin (saudara dari Wan Usman/ Datuk Aji Rangga Usman) yang diangkat sebagai mata-mata di Pulau Bangka di mana kedudukannya tersebut sama dengan kedudukan Demang atau Camat dalam pemerintahan kolonial Belanda. Pengangkatan Datuk Mata-Mata ini dilakukan bersamaan dengan pengangkatan Wan Usman sebagai Rangga di Pulau Bangka.

10) Batin Pesirah

Pesirah (Pasirah) adalah gelar jabatan Kepala Marga di wilayah Palembang. Biasanya untuk marga-marga yang besar. Terdapat juga Pasirah uluan atau pucukan yang merupakan jabatan Pasirah daerah uluan, atau Kepala Adat/ Kepala Pemerintahan di daerah uluan. Lebih tinggi tingkatannya dari Proatin.

11) Ngabehi

Ngabehi (kadang disebut juga Ngambai) adalah seorang pegawai rendah¹². Ngabehi merupakan jabatan seseorang yang bertugas menyatukan atau mengkoordinir pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam lingkungan tugasnya.

¹² Dr. Husni Rahim, hal 278.

5) Bupati

Bupati adalah jabatan yang memegang kekuasaan adalah sebuah daerah di bawah raja/ Sultan. Di Bangka, jabatan Bupati tercatat pada masa era Banten yakni Bupati Nusantara yang menjadi raja kecil perwakilan Banten atas Pulau Bangka.

6) Datuk Dalam

Datuk Dalam atau Datuk Dalam Hakim adalah gelar yang dikenal orang Mentok untuk Wan Abdul Jabar, ayah dari Zamnah/ mertua Sultan Mahmud Badaruddin Jayawikrama. Selain Datuk Dalam, Wan Abdul Jabar juga dikenal dengan Datuk Temenggung Prabu Nata Menggala (lihat Arifin Mahmud; *Pulau Bangka dan Budayanya*, Jilid I, Halaman 27).

7) Hakim

Gelar hakim di masa Bangka di bawah kekuasaan Kesultanan Palembang adalah jabatan bagi orang memegang kekuasaan atas penghulu agama Islam yang dapat memutuskan perkara agama di Bangka.

8) Rangga

Rangga atau Menteri Rangga adalah sebutan atas gelar kepala yang berkuasa di Pulau Bangka setelah periode Datuk Dalam-Wan Akub di Mentok. Di Kesultanan Palembang, jabatan Rangga ini adalah pemimpin sebuah wilayah (seperti Bupati/ Gubernur) di mana orang yang menjabat adalah kerabat Sultan sendiri.

12) Temenggung

Temenggung merupakan pimpinan yang bertanggung jawab dan berhak memeriksa permasalahan/ urusan atas nama Raja atau pemegang kekuasaan atas sebuah wilayah atas nama Raja (di Jawa setingkat kabupaten). Temenggung adalah kontroler bagi Raja, baik yang terbuka maupun rahasia.

13) Jenang

Jenang adalah sebutan bagi pegawai kesultanan (Palembang), merujuk kepada seseorang yang diberi hak penguasaan terhadap sebuah daerah (dusun/ kampung) atas nama Sultan. Jenang mengumpulkan hasil bumi, menyelesaikan masalah (sesuai kewenangannya) dan menyampaikan perintah Sultan kepada Kepala Dusun. Jabatan ini tidak permanen, dapat diganti oleh Sultan sewaktu-waktu.

14) Penghulu

Penghulu merupakan pejabat yang membawahi urusan agama Islam. Jabatan penghulu mulai ada di masa Bangka dalam pengaruh kekuasaan Kesultanan Palembang. Bermula dijabat oleh Datuk Dalam Hakim (mertua Sultan Mahmud Badaruddin I) dan digantikan oleh Wan Akub, dilanjutkan oleh Rangga Usman. Di masa Abang Pahang-Abang Ismail-Abang Toyib, Penghulu diangkat oleh Temenggung Mentok. Hingga di era kolonial Belanda jabatan penghulu tetap ada, namun dengan penyesuaian tugas dan kewenangan. Penghulu sebagai pejabat agama biasanya adalah ulama yang peran sosial keagamaan mencakup hampir di semua sektor kehidupan, seperti bidang ibadah, pendidikan, ekonomi, kekeluargaan, kemasyarakatan dan sebagainya.

Salah satu aktivitas yang paling menonjol ialah sebagai pelaksana bidang peradilan, perundang-undangan, dan fatwa. Sebagai pemimpin agama, tentunya penghulu diminta pendapatnya tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum Islam.

Merujuk pada tulisan Dr Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, lampiran 8, hal 292, daftar Kepala Penghulu di Bangka tahun 1831-1928 adalah sebagai berikut:

PENGHULU	PERIODE
H. Karangga Saleh	1831 – 1836
Abang Yusuf	1837 – 1839
Abang Abdurrahman	1840 – 1850
Abang Abdul Ranie	1851 – 1863
H. Mohammad Seman	1864 – 1896
H. Marzuki	1897 – 1909
H. Ahmad bin H. Sulaiman	1910 – 1911
H. Mohammad Noor bin H. Abdul Ranie	1912 – 1928

15) Khadi/Qadhi

Khadi/ Qadhi adalah sebutan gelar bagi pejabat agama Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Qadhi adalah hakim yang mengadili perkara agama Islam. Namun di Kesultanan Palembang, Qadhi juga adalah sebutan bagi pejabat yang bertugas memberikan fatwa/ nasehat/ dakwah dan memutuskan masalah atau dalam sebutan lain juga dikenal dengan sebutan Mufti.

17) Modin

Modin atau Mudin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti juru azan; muazin, pegawai masjid. Modin adalah seorang pegawai rendahan dalam soal administrasi agama yang membantu seorang Penghulu dalam berbagai upacara keagamaan. Dalam perkembangannya, seperti di Jawa pada abad ke-19, Modin digunakan untuk menunjukkan pejabat keagamaan tingkat desa, satu tingkat di bawah Penghulu Kabupaten, atau Naib. Modin bertanggung jawab mengenai urusan-urusan keagamaan penduduk desa, seperti menemani pengantin wanita dan pria ke Naib dan membantu mempersiapkan pernikahan.

18) Jenang

Jenang adalah jabatan administrasi (di Bangka yang bertugas sebagai pengawas atas timah tiban/ pengiriman timah dari Bangka ke Palembang) yang ditunjuk oleh Sultan.

19) Dipati

Dipati (Depati), dikenal sebagai raja kecil di pedalaman. Mereka adalah kepala rakyat yang bebas, tidak memiliki kewajiban membayar upeti kepada Sultan. Hanya belakangan sebagai tanda dan hubungan dengan Sultan diadakan kewajiban *tiban tukon* (Sultan memberi barang-barang seperti garam, kain, dan sebagainya, ditukar dengan hasil dari daerah yang dipimpin oleh Depati)¹³.

Jabatan Depati dikenal pada masa pemerintahan Abang Pahang di mana jabatan Patih di Bangka diubah menjadi Depati, yang kedudukannya setara dengan jabatan Depati di Uluan Palembang.

¹³ Dr. Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam*, hal 277-278

Depati dibantu oleh beberapa Proatin dan Krio. Tugas yang menjadi tanggung jawab mereka adalah menjalankan roda pemerintahan, peradilan dan memelihara adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat sindang.

20) Depati Ulu

Depati Ulu atau Depati Uluan adalah jabatan bagi Depati di kawasan uluan atau perbatasan (seperti daerah Pasemah, Rejang, Ampat Lawang, dan lainnya di era Kesultanan Palembang).

21) Demang

Demang adalah jabatan setara Camat saat sekarang, pejabat yang memegang pimpinan kekuasaan sebuah wilayah daerah.

22) Keria

Keria atau Kria (Krio) adalah singkatan dari ki(ai) atau ria, yaitu Kepala Dusun.

23) Kapiten Cina

Kapiten/ Kapitan Cina atau Kapitan Tionghoa merujuk kepada gelar jabatan untuk para petinggi kalangan masyarakat Tionghoa yang ditunjuk oleh pemerintahan kerajaan/ kesultanan (pribumi) dan kemudian oleh pemerintah kolonial. Di Pulau Bangka, gelar ini erat hubungan dengan praktek penambangan timah. Gelar Kapiten Cina telah ada di masa Bangka di bawah pengaruh kekuasaan Kesultanan Palembang. Di masa pemerintahan kolonial Belanda, institusi Kapiten Cina memiliki tiga pangkat; *Majoor*, *Kapitein*, dan *Luitenant der Chinezen*, yang keseluruhan disebut *Chinese Officieren* atau opsir Tionghoa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan literasi:

- Arifin Mahmud, *Pulau Bangka dan Budayanya*, jilid I, II, 1986, tidak diterbitkan.
- Barbara Watson Andaya; *Hidup Bersaudara, Sumatra Tenggara pada Abad XVII dan XVIII*, Penerbit Ombak, 2016.
- BPCB Kota Jambi, *Kepurbakalaan masa kolonial Mentok*, 2014.
- Court, MH; *An Exposition of the Relations of the British Government with the Sultaun [sic] and State of Palembang and the Designs of the Netherlands' Government upon that Country; with Descriptive Accounts and Maps of Palembang and the Island of Banca*, 1821.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bangka, *Kapita Seleka Budaya Bangka buku I*, 1995.
- Dinas Perhubungan, Pariwisata, Kebudayaan dan Informatika Kab. Bangka Barat, *Sejarah Mentok*, 2013.
- Erman, Erwiza; *Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap, Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*, 2009.
- Erman, Erwiza; *Koeli Cina di Tambang Timah Bangka Belitung, 1852-1940*, Universitas Indonesia, 1992.
- Haryono, Steve. *Perkawinan Strategis: Hubungan Keluarga Antara Opsir-Opsir Tionghoa dan Cabang Atas di Jawa pada Abad ke-19 dan 20*. Rotterdam, 2017.
- Heidhues, Mary F Somers; *Timah Bangka dan Lada Mentok: Peran Masyarakat Tionghoa Dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s/d Abad XX*, Yayasan Nabil, 2008.
- Hooker, Virgiana Matheson, *Tuhfat Al Nafis, Sejarah Melayu Islam*, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1991.

- Horsfield, Thomas, M.D; *Report on the Island of Banka, The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* (JIAEA), vol ii, n. vi, 1848.
- Kemas Ridwan Kurniawan, *The Hibrid architecture of colonial tin mining town of Mentok*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2013.
- Kementerian Penerangan RI, *Propinsi Sumatera Selatan Republik Indonesia*, 1954.
- KITLV Leiden, *Or. 67 Tjarita Bangka I*, 1878.
- KITLV H 1198, 1: *Riwajat poelau Bangka berhoeboeng dengan Palembang*, RAhmad en Abang Abdul Jalal, 1925.
- M Isa Djamaludin, *Peninggalan-peninggalan masa silam di Mentok Bangka* (laporan), tidak diterbitkan, 1983.
- M Dien Madjid, Dkk, *Sejarah Bangka Belitung dari masa ke masa, Volume I*, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2018.
- Raden Affan, *Sejarah Masjid Jamik Muntok sepanjang masa*, Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangka Barat, 2007.
- Rahim, Husni; *Sistem Otoritas & Administrasi Islam: Studi tentang pejabat agama masa Kesultanan dan kolonial di Palembang*, 1998.
- RMAkib dan R Ibrahim, *Sedjarah Malaju Palembang*, 1912.
- Rukman Ali; *Pulau Bangka dari Jaman ke Jaman*, tidak diterbitkan, 1995.
- Sujitno, Sutedjo; *Sejarah Penambangan Timah di Indonesia*, 2007.
- Sujitno, Sutedjo, *Legenda dalam Sejarah Bangka*, Cempaka Publishing, 2011.

- Sujitno, Sutedjo; *Timah Indonesia Sepanjang Sejarah* (Cetakan ketiga), PT Timah Tbk, 2015.
- *Universiteitsbibliotheek Leiden* (UBL) COD. Or. 2285 *Soerat tjerita atsal tanah dan orang jang mendijami tanah Banka*, 1879.
- Wieringa, Edwin Paul, *Tjarita Bangka: het Verhaal van Bangka/tekstuitgave met intruductie en addenda(door), Semain; 2*, Leiden: Rijksuniversiteit te Leiden, 1990.

Bacaan online:

- <http://ariefdarmawan13ad.blogspot.com/2014/03/tata-birokrasi-kesultanan-palembang.html> (diakses 16 Juli 2019.12.06 WIB).
- http://www.researchgate.net/The-Map-of-Muntok-in-1859-SourceKoninklijk-Instituut-voor-deTaal-Land-en-Volkenkunde_fig2_322454100 (diakses 27 September 2022).